



LAKIP 2013



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Hakikat dari LAKIP adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta tepat sasaran sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Namun dari semua itu, hal yang paling utama dari makna penyusunan dokumen ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah terhadap amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Perlu diketahui bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyelesaikan tugas untuk tahun kelima dari RPJMD Prov Kalbar 2008-2013 dan Renstra Dinas 2008-2013. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sektor industri dan perdagangan bersama dengan sektor pertanian menjadi tiga besar sumber pertumbuhan dalam PDRB Kalimantan Barat. Namun demikian, kondisi tersebut menyisakan catatan penting mengingat bahwa selama kurun waktu tersebut sektor industri Kalbar masih sangat rapuh dan didominasi oleh industri hulu sedang/besar dengan nilai tambah produk yang sangat kecil. Sementara di sektor perdagangan, ekspor Kalbar masih didominasi oleh ekspor bahan mentah atau bahan baku terutama bahan tambang dan karet.

Terkait dengan kinerja Dinas Perindag Kalbar di tahun anggaran 2013, catatan mengembirakan ditunjukkan dengan rerata pencapaian target indikator kinerja sebesar 133 %. Dari enam sasaran strategis, hanya satu sasaran yang tidak mencapai target, yaitu angka pertumbuhan ekspor yang hanya mencapai 3,83% dari target sebesar 12 %. Namun demikian pencapaian tersebut patut disyukuri karena menandakan pertumbuhan ekspor Kalbar kembali ke tren positifnya setelah mengalami penurunan drastis di tahun 2012 sebesar 30 % akibat regulasi pembatasan ekspor bahan baku serta penurunan permintaan karet dunia akibat resesi. Tentunya fenomena anjloknya nilai ekspor Kalbar tersebut menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi Dinas Perindag Kalbar untuk lebih giat mendorong hilirisasi komoditi primer di Kalimantan Barat serta mencari peluang-peluang ekspor baru.

Dan akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dokumen LAKIP 2013 Dinas Perindustrian dan perdagangan Kalbar berhasil disusun, dengan berpedoman pada Peraturan Menpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi bukan hanya tentang capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja namun juga berisi evaluasi capaian kinerja yang memuat hambatan atau kendala yang dihadapi serta solusi untuk ke depan. Turut serta dalam LAKIP 2013 ini dilaporkan realisasi anggaran 2013 Dinas Perindag Kalbar.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja organisasi untuk peningkatan kinerja serta pelaporan di tahun-tahun ke depan.

Pontianak, Februari 2014
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. ROBERTUS ISDIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580928 198411 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak dan merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kalimantan Barat sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (TUPOKSI) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat; dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 November 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindag Provinsi Kalbar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar didukung oleh 159 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional umum, serta pejabat fungsional yang berjumlah 17 orang yang tersebar di Dinas dan UPT. Empat unit UPT pendukung program kerja Dinas Perindag Prov. Kalbar tersebut yakni UPSMB, UP Kemetrolagian Pontianak, UP Kemetrolagian Singkawang, dan UP IKM. Kecuali UP Kemetrolagian Singkawang, Dinas dan 3 UPT lainnya berlokasi di Kota Pontianak.

Pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalimantan Barat mendapatkan anggaran yang berasal dari dua sumber pembiayaan yaitu APBD dan APBN. Anggaran Belanja Langsung yang berasal dari APBD berjumlah Rp. 10.696.777.500, sementara yang bersumber dari APBN terdiri dari APBN Kementerian Perindustrian RI sebesar Rp. 2.853.000.000 dan APBN Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 2.208.929.000. Sementara total anggaran belanja langsung UPT di lingkungan Dinas Perindag Kalbar berjumlah sebesar Rp. 6,951,575,000.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar Periode 2008-2013, terdapat enam sasaran strategis yang pada tahun anggaran 2013 meliputi 15 indikator kinerja utama. Dari keenam sasaran strategis tersebut, satu sasaran strategis memiliki tingkat pencapaian dibawah 100 %, yaitu Peningkatan ekspor dan pengendalian impor yang hanya sebesar 31,92 %. Namun demikian, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Dinas Perindag Kalbar tahun 2013 mencapai kurang lebih sebesar 133 %.

Rincian tingkat pencapaian kinerja Dinas Perindag Kalbar tahun 2013 per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat dengan pencapaian sebesar 246 % yang dibagi dalam empat indikator kinerja utama.
 - 1.1. Laju pertumbuhan sector industri Kalbar Pertahun dengan target sebesar 2,76% dan realisasi sebesar 4,59%. (tingkat pencapaian sebesar 166,30%).
 - 1.2. Jumlah kawasan industri yang difasilitasi penumbuhannya dengan target sebesar 2 kawasan dan realisasi sebesar 3 kawasan. (tingkat pencapaian sebesar 150 %).
 - 1.3. penumbuhan dan penguatan industri unggulan provinsi, dengan target sebesar 2 unit usaha dan realisasi sebesar 9 unit usaha. (tingkat pencapaian sebesar 450 %).

- 1.4. Jumlah Alsintan yang diperbaiki, dengan target sebesar 10 unit dan realisasi sebesar 22 unit. (tingkat pencapaian sebesar 220 %)
2. Sasaran strategis 2. Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah (IKM) Kalbar dengan pencapaian sebesar 136 % yang dibagi dalam empat indikator kinerja utama.
 - 2.1. Persentase Jumlah pertumbuhan IKM Kalbar, dengan target sebesar 4,70 % dan realisasi sebesar 1,40 %. (tingkat pencapaian sebesar 29,79 %)
 - 2.2. Jumlah IKM Kalbar yang mendapat penghargaan baik skala nasional maupun internasional, dengan target sebesar 3 unit usaha dan realisasi sebesar 2 unit usaha. (tingkat pencapaian sebesar 66,67 %)
 - 2.3. Jumlah pembentukan dan penguatan sentra/unit usaha IKM, dengan target sebesar 86 unit usaha dan realisasi sebesar 213 unit usaha. (tingkat pencapaian sebesar 247,67 %).
 - 2.4. Jumlah IKM yang mendapat sertifikat, dengan target sebesar 30 unit usaha dan realisasi sebesar 60 unit usaha. (tingkat pencapaian sebesar 200 %).
3. Sasaran strategis 3. Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri, dengan indikator kinerja utama yaitu Laju inflasi Kalbar dengan target 5,47 % dan realisasi sebesar 9,4 % pencapaian sebesar. (tingkat pencapaian sebesar 57,7 %).
4. Sasaran strategis 4. Peningkatan dan perlindungan konsumen, dengan pencapaian sebesar 138 % yang dibagi ke dalam dua indikator kinerja utama.
 - 4.1. Jumlah UTTP yang wajib ditera di pasar tradisional yang diawasi, dengan target sebesar 370 unit dan realisasi sebesar 597 alat. (tingkat pencapaian sebesar 161,35 %).
 - 4.2. Barang beredar dan jasa yang diawasi, dengan target sebesar 6 jenis barang dan realisasi sebesar 7 jenis barang. (tingkat pencapaian sebesar 116,67 %).
5. Sasaran strategis 5. Peningkatan Ekspor daerah dan pengendalian impor, dengan indikator kinerja utama yaitu Pertumbuhan Nilai ekspor Kalbar dengan target sebesar 12 % dan realisasi sebesar 3,83 %. (tingkat pencapaian sebesar 31,92 %).

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	1
A.1. TUGAS POKOK, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI.....	1
A.2. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
A.3. SARANA DAN PRASARANA	7
A.4. SUMBER DAYA KEUANGAN	7
A.5. HAL-HAL LAIN YANG MENDUKUNG	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP 2013	8
C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. KEBIJAKAN NASIONAL DAN RPJMD PROV. KALBAR TAHUN 2008-2013	10
B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2008-2013	11
C. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	29
B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	35
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	63
BAB IV P E N U T U P	30
A. KESIMPULAN	30
B. SARAN	33
LAMPIRAN	35

Daftar Tabel

Tabel 1 Rencana kinerja tahunan 2013	15
Tabel 2 Target Sasaran Berdasarkan IKU Provinsi Sesuai RPJMD Prov. Kalbar 2008 – 2013	16
Tabel 3 Penetapan kinerja dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Kalimantan Barat.....	18
Tabel 4 Dukungan UPT terhadap pencapaian sasaran strategis dinas perindustrian dan perdagangan Prov. Kalbar	25
Tabel 5 Capaian indikator kinerja utama TA 2013	29
Tabel 6 Perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2012 dan 2013	31
Tabel 7 Capaian indikator kinerja utama UPT	33
Tabel 8 Capaian sasaran berdasarkan iku RPJMD Prov. Kalbar 2008-2013	34
Tabel 9 Program dan kegiatan ilmea.....	35
Tabel 10 Program dan kegiatan ikahh.....	36
Tabel 11 Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar tahun 2013	37
Tabel 12 Program dan kegiatan pengembangan IKM Kalbar	44
Tabel 13 Perkembangan IKM Kalimantan Barat	45
Tabel 14 Program dan kegiatan efisiensi dan distribusi perdagangan dalam negeri	48
Tabel 15 Inflasi kota Pontianak menurut kelompok	49
Tabel 16 Program peningkatan perlindungan konsumen.....	52
Tabel 17 Program peningkatan daya saing ekspor	54
Tabel 18 Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	55
Tabel 19 Golongan barang penyumbang ekspor terbesar Kalbar 2013.....	56
Tabel 20 Golongan barang penyumbang impor terbesar Kalbar 2013.....	56
Tabel 21 Program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.....	60
Tabel 22 Realisasi penerimaan pada tahun 2013.....	61
Tabel 23 Rekapitulasi belanja di lingkungan Dinas Perindag Kalbar TA 2013.....	63
Tabel 24 Realisasi anggaran pembiayaan APBD program dan kegiatan strategis TA 2013	66
Tabel 25 Realisasi anggaran program dan kegiatan rutin TA 2013.....	72
Tabel 26 Realisasi program dan kegiatan APBN TA 2013.....	29

Daftar Gambar

Gambar 1 struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. kalbar	6
---	---

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Rekapitulasi laporan barang per 31 desember 2013	35
Lampiran 2 Komposisi aparatur dinas perindustrian dan perdagangan Prov. Kalbar.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari Dinas Perindustrian Dati I Kalimantan Barat dengan Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, pada Tahun 2001 berkaitan dengan diterapkannya Otonomi Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak dan merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kalimantan Barat sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (TUPOKSI) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat; dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 November 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindag Provinsi Kalbar.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas Umum Pemerintahan (pelayanan publik) dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis dan 1 (satu) unit pelatihan yaitu, Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB), Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak, dan Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang serta Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai langkah awal dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan perumusan anggaran.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat beserta unit-unit pendukungnya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung oleh dana APBN.

A.1. TUGAS POKOK, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka atas dasar ketentuan tersebut urusan / bidang Perindustrian dan

Perdagangan menjadi tanggungjawab dan kewenangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; industri logam, mesin, elektronika dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrolgian; serta perdagangan luar negeri;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan; industri logam, mesin dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrolgian; serta perdagangan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; industri logam, mesin dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrolgian; serta perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; industri logam mesin dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrolgian serta perdagangan luar negeri;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang indutri kimia, agro dan hasil hutan; industri logam, mesin dan aneka; perdagangan dalam negeri dan kemetrolgian; serta perdagangan luar negeri;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, rencana strategis, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset.

Sekretariat membawahi :

Subbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, rencana strategis, monitoring dan evaluasi.

Subbag Umum dan Aparatur yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta urusan umum,

Subbag Keuangan dan Asset yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset.

3. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi, industri kimia, agro dan hasil hutan; pengembangan usaha industri kimia, agro dan hasil hutan; serta sarana industri kimia, agro dan hasil hutan.

Bidang IKAHH membawahi :

Seksi Pengembangan Produksi IKAHH yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi industri kimia agro dan hasil hutan.

Seksi Pengembangan Usaha IKAHH yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri kimia agro dan hasil hutan.

Seksi Sarana IKAHH yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang sarana industri kimia, agro dan hasil hutan.

4. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka; pengembangan usaha Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka; serta sarana Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

Bidang ILMEA membawahi :

Seksi Pengembangan Produksi ILMEA yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi industri logam, mesin, elektronika dan aneka.

Seksi Pengembangan Usaha ILMEA yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka.

Seksi Sarana ILMEA yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang sarana industri logam, mesin, elektronika dan aneka.

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Kemetrolgian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan; kemetrolgian dan perlindungan konsumen; serta sarana perdagangan.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Kemetrolgian membawahi :

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan.

Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kemetrolgian dan perlindungan konsumen.

Seksi Sarana Perdagangan yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang sarana perdagangan.

6. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ekspor, impor dan pengembangan pasar luar negeri.

Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi :

Seksi Ekspor yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang ekspor.

Seksi Impor yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang impor.

Seksi Pengembangan Pasar Luar Negeri yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan pasar luar negeri.

7. Unit Pelaksana Teknis

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas :

a. **Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak**

Wilayah kerja melingkupi di 11 Kab/Kota (Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara). Tugas dari Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat di bidang kemetrolgian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak terdiri dari Kepala Unit, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Massa dan Timbangan, Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. **Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang**

Wilayah kerja melingkupi 3 Kab/Kota (kota Singkawang, Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang). Tugas dari Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat di bidang kemetrolgian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. **Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang**

Berlokasi di Kota Pontianak dengan wilayah kerja melingkupi 14 Kab/Kota se-Kalbar dan tugasnya adalah melaksanakan pengujian contoh dan kalibrasi untuk kepentingan sertifikasi (certificate of conformity) dan non sertifikasi. Struktur Organisasi Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari Kepala Unit, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Jaminan Mutu, Seksi Bimbingan dan Teknis Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

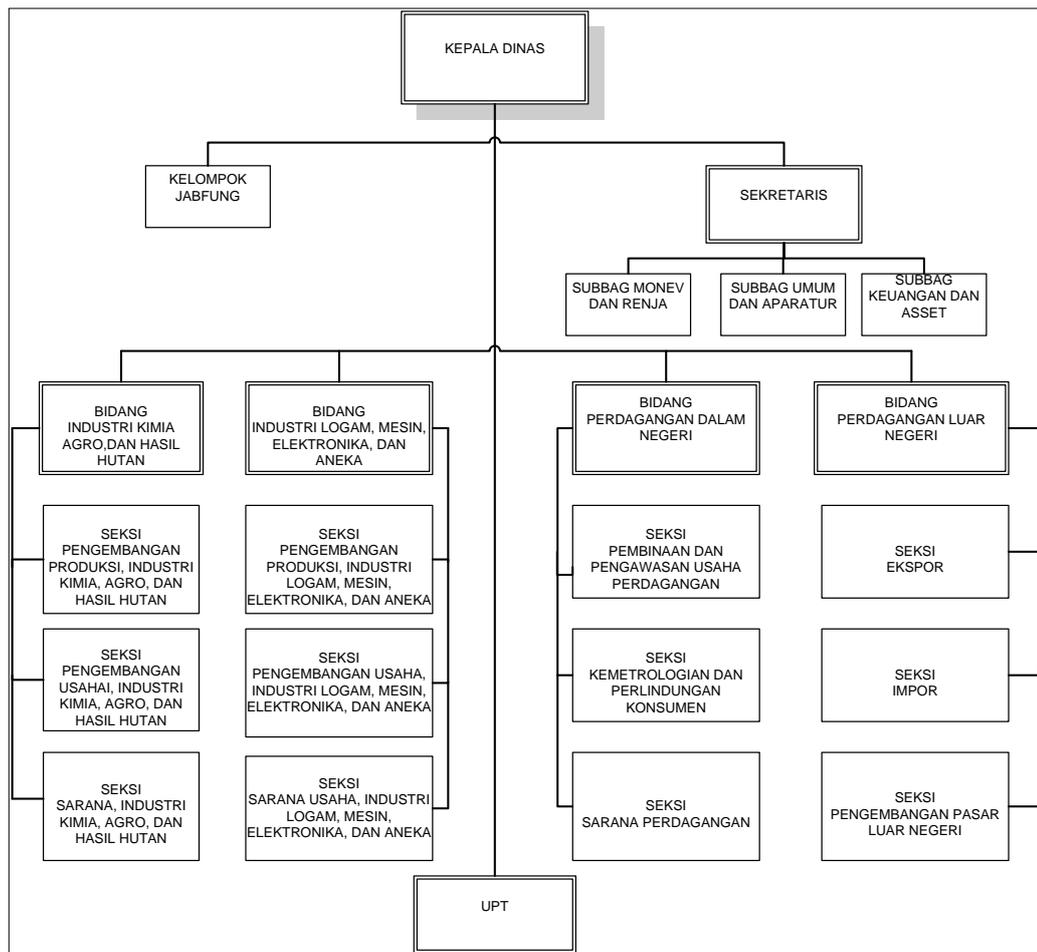
d. **Unit Pelatihan IKM Kalbar**

Berlokasi di kota Pontianak dengan wilayah kerja melingkupi 14 Kab/Kota se-Kalbar dengan tugas melaksanakan sebagian tugas teknis bidang pelatihan industri kecil menengah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Struktur Organisasi Unit Pelatihan IKM Kalbar terdiri dari Kepala Unit, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, Seksi Bimbingan Pasca Pelatihan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Ada tiga jenis jabatan fungsional yang dijabat oleh sejumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yaitu Jabatan fungsional Penguji Mutu Barang (PMB), Tenaga Penerima, dan Tenaga Arsiparis.

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR



A.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar didukung oleh 159 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional umum, serta pejabat fungsional yang berjumlah 17 orang yang tersebar di Dinas dan UPT dengan komposisi sebagai berikut:

- UPSMB sebagai tenaga Penguji Mutu Barang sebanyak 7 orang.
- UP. Kemetrolgian Pontianak sebagai tenaga Penera sebanyak 6 orang (Penera Ahli: 2 orang; Penera Terampil: 4 orang).
- UP. Kemetrolgian Singkawang sebagai tenaga Penera (terampil) sebanyak 3 orang.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai tenaga Arsiparis Penyelia sebanyak 1 orang.

Namun demikian, komposisi pegawai tersebut dirasakan masih belum ideal untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam menghadapi perkembangan sektor industri dan perdagangan yang sangat dinamis. Setidaknya masih dibutuhkan tenaga teknis dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tenaga Fungsional Penera: dibutuhkan 12 orang Penera terampil dengan latar belakang pendidikan minimal SMA Eksakta atau kejuruan dan 8 Orang Tenaga Penera Ahli dengan latar belakang pendidikan minimal S1 Teknik. Tenaga tersebut dibutuhkan untuk mendukung kinerja kemetrolgian.
- b. Tenaga Pranata Komputer: dibutuhkan sebanyak 9 orang dengan pendidikan minimal D3 komputer. Saat ini telah terisi 1 melalui penerimaan CPNS Pemda Provinsi Kalbar tahun 2013.
- c. Tenaga Akuntansi: dibutuhkan sebanyak 4 orang dan telah terisi 1 orang sehingga kekurangan tenaga tersebut sebanyak 4 orang dengan pendidikan minimal D3 Akuntansi.
- d. Tenaga kearsipan: dibutuhkan sebanyak 2 orang dengan pendidikan minimal D3 Kearsipan.
- e. Tenaga Penguji Mutu Barang: dibutuhkan sebanyak 5 orang tenaga PMB Ahli dengan latar belakang pendidikan minimal S1 Eksakta dan 2 orang tenaga PMB terampil dengan latar belakang pendidikan minimal D3 Analisis/Fisika/Kimia.

A.3. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menempati kantor di Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pontianak yang tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Kalbar. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 tanah kantor dan 4 tanah rumah dinas yang semuanya berasal dari APBN yang diperoleh melalui pengadaan tahun 1961 sampai 1986. Sedangkan untuk peralatan angkutan, terdapat 12 alat angkutan yang terdiri kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit yang berasal dari hibah atau APBD melalui pengadaan tahun 1996 sampai tahun 2011. Untuk peralatan kantor dan rumah tangga, terdapat 178 macam atau jenis yang semuanya berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana ini dapat dilihat pada lampiran 4 tentang Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Walaupun demikian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki ruangan khusus yang layak untuk penyimpanan arsip. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam penyusunan arsip yang tertib dan sering kali menjadi penghambat dalam penelusuran arsip pada kondisi-kondisi khusus, seperti pemeriksaan (audit).

A.4. SUMBER DAYA KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalimantan Barat mendapatkan anggaran yang berasal dari dua sumber pembiayaan yaitu APBD dan APBN. Anggaran Belanja Langsung yang berasal dari APBD berjumlah RP.. 10.696.777.500, sementara yang bersumber dari APBN terdiri dari APBN Kementerian Perindustrian RI sebesar RP.. 2.853.000.000 dan APBN Kementerian Perdagangan RI sebesar RP.. 2.208.929.000.

A.5. HAL-HAL LAIN YANG MENDUKUNG

Disamping diperkuat oleh UPTD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga ditunjang oleh peran instansi vertikal Kementerian Perindustrian di daerah Kalimantan Barat baik melalui hubungan koordinasi langsung dan tidak langsung. Instansi vertikal di daerah tersebut yaitu :

1. Badan Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan (Baristand Indag Pontianak)
2. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Pontianak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP 2013

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

- Sebagai bahan pertanggungjawaban atas tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, visi, misi, tujuan/sasaran strategis yang dicapai selama tahun 2012 dan disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
- Sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimasa yang akan datang sehingga capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat ditingkatkan.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Sistematika penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menyajikan gambaran umum organisasi Dinas Perindag Prov. Kalbar terutama terkait tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. Selain itu diuraikan secara singkat mandat yang dibebankan kepada Dinas Perindag, serta kekuatan berbagai sumber yang mempengaruhi kinerja terutama terkait SDM dan sarana prasarana.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA. Bab ini mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan kinerja Dinas Perindag Prov. Kalbar terutama terkait perencanaan strategis termasuk visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindag. Bab ini juga menyajikan penetapan kinerja tahun 2013 terutama kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun yang sama.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Bab ini juga melaporkan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran termasuk capaian indikator kinerja.

BAB IV. PENUTUP. Pada bab ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perindag serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. KEBIJAKAN NASIONAL DAN RPJMD PROV. KALBAR TAHUN 2008-2013

Perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar tentunya sejalan dengan Kebijakan Nasional terutama yang terkait dengan sektor Industri dan perdagangan. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengembangan industri Kalimantan Barat. Kebijakan Peraturan tersebut mengamanatkan model pengembangan industri yang dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui pendekatan Top-Down berupa:

1. Pengembangan 10 Klaster Industri Prioritas (Industri-industri makanan & minuman, pengolahan hasil laut, TPT, alas kaki, kelapa sawit, barang kayu (rotan & bambu), karet & barang karet, pulp & kertas, mesin listrik & peralatan listrik, kimia)
2. Pengembangan Industri Prioritas Penunjang dan Terkait
3. Pengembangan Industri Andalan Masa Depan
4. Pengembangan IKM Tertentu

Sedangkan pendekatan *Bottom - Up* dilaksanakan melalui pengembangan industri kompetensi inti daerah (Kabupaten/Kota) dan Industri prioritas provinsi. Khusus pengembangan industri prioritas provinsi Kalimantan Barat untuk komoditi Sawit dan Karet, rencana tersebut telah disahkan dalam Permenperin Nomor 143 Tahun 2010 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Barat (Karet dan Kelapa Sawit).

Sementara itu di sektor Perdagangan, pengembangan perdagangan Kalimantan Barat tidak lepas dari arahan kebijakan nasional yang dielaborasi dalam perencanaan strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Arah kebijakan nasional bidang perdagangan luar negeri menitikberatkan pada pengembangan produk ekspor nonmigas serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor. Sementara arah pengembangan kebijakan nasional dalam negeri adalah peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Prov. Kalimantan Barat tentunya melandasi perencanaannya dalam kerangka Rencana Strategis Pemda Kalimantan Barat yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2008-2013 dipandu oleh beberapa langkah strategis yaitu peningkatan investasi, mendorong industri pengolahan, peningkatan perdagangan dan ekspor daerah, serta pengembangan kegiatan UMKM dan Koperasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan ekonomi Kalimantan Barat diarahkan pada beberapa kebijakan strategis. Kebijakan strategis yang terkait dengan pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2008-2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Subsistem industri hilir yang terintegrasi dengan basis pada industri pengolahan hasil perikanan, pertanian dan perkebunan, kehutanan serta pertambangan

2. Penumbuhan klaster industri, baik pada industri besar dan sedang maupun pada IKM
3. Memperkuat basis industri yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor
4. Perluasan jaringan distribusi dan penyebaran informasi perdagangan/bisnis serta peningkatan perlindungan konsumen
5. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan termasuk di kawasan perbatasan
6. Memfasilitasi pelaku usaha dalam memasarkan produk daerah
7. Memperkuat kegiatan promosi dan misi dagang untuk meningkatkan ekspor daerah
8. Meningkatkan daya saing KUKM (IKM) untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja
9. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan WUB

Berdasarkan aspek Kelembagaan, keberadaan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan tersebut kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda Prov. Kalimantan Barat dengan terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang di dalamnya tertuang serta Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Eksistensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar kemudian di jabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2008-2013

Berdasarkan Kebijakan-kebijakan tersebut di atas baik yang strategis perencanaan maupun strategis kelembagaan di level Nasional maupun daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebuah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalimantan Barat 2008-2013 dengan Visi:

“Terwujudnya Industri yang Maju dan Perdagangan yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat”

Dengan Misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut yang adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan perindustrian daerah Kalimantan Barat.
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk dapat eksis dalam pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan daerah Kalimantan Barat serta meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi dan misi serta dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan eksternal dan internal telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang dikelompokkan ke dalam dua agenda dan setiap tahunnya ditindaklanjuti dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Agenda pertama : Membina dan menumbuhkan kembangkan sektor Industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan industri dan perdagangan daerah Kalimantan Barat melalui pemanfaatan sumber daya daerah yang mempunyai daya saing, peningkatan teknologi, penyebaran informasi, profesionalisme pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan daya saing bidang industri Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> - Laju rerata pertumbuhan ekonomi sektor industri sebesar 1 – 2,87 % per tahun - Tumbuh dan berkembang industri kecil dan menengah

Agenda kedua : Membina perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberi kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat melalui pengembangan pasar yang terintegrasi, penciptaan iklim usaha yang kompetitif, pengendalian inflasi, mendorong penumbuhan dan pengembangan sektor produksi perdagangan dalam dan luar negeri guna peningkatan ekspor, penciptaan tertib usaha dan upaya perlindungan konsumen.

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan kelancaran distribusi penggunaan produk dalam negeri perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan mengembangkan perdagangan yang tertib efisien, transparan dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri - Peningkatan dan Perlindungan Konsumen
Meningkatkan perluasan pasar dan kelancaran perdagangan luar negeri serta pengamanan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ekspor dan terkendalinya impor
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang prima dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelayanan UPT dilingkungan Disperindag Prov Kalbar kepada masyarakat dan dunia usaha

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai maka harus dipilih strategi yang tepat guna meningkatkan kinerja dinas. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat mencakup kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk dari tiap-tiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 : Laju rerata pertumbuhan ekonomi sektor industri sebesar 1,79 %

KEBIJAKAN	PROGRAM
Mendorong penumbuhan dan pengembangan industri dan perdagangan berbasis kawasan melalui bantuan dan fasilitasi teknis dan kelembagaan, peralatan, manajerial dan pemasaran	- Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).
Mengupayakan penerapan pengembangan industri berdasarkan pola kluster melalui fasilitasi penguatan <i>linkage</i> , pemanfaatan hasil-hasil litbang industri, penyediaan informasi teknologi, fasilitasi instruktur, fasilitator, narasumber dan melakukan peningkatan upaya konsultasi, advokasi untuk pengembangan usaha dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan di bidang industri terutama HaKi, standarisasi industri, packaging, dan labeling baik melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan industri terkait di pusat dan daerah.	- Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA)

Sasaran 2 : Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing minimal 2 unit usaha yang mendapatkan pengakuan atau penghargaan di forum nasional dan internasional serta pertumbuhan IKM sebesar 4,5 %

KEBIJAKAN	PROGRAM
Mendorong dan menumbuhkembangkan IKM melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta penyediaan informasi pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal dan atau sumberdaya kultural/budaya setempat, serta penyediaan tempat konsultasi teknis dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) - Program Revitalisasi Dan Pengembangan IKM (APBN)

Sasaran 3 : Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri dengan menekan laju inflasi Kalbar sebesar 4,22%

KEBIJAKAN	PROGRAM
Mengupayakan ketersediaan bahan pokok, barang strategis dan barang penting lainnya bagi Masyarakat dan peningkatan pemasaran produk daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi (APBN) - Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (APBN)

Sasaran 4 : Peningkatan Perlindungan Konsumen dengan meningkatnya jumlah pengaduan sebesar 14 pengaduan dari konsumen.

KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan pelaksanaan perlindungan Konsumen melalui pengawasan barang beredar dan operasionalisasi serta kapasitas kemetrolgian	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perlindungan Konsumen - Program Peningkatan Perlindungan Konsumen (APBN)

Sasaran 5 : Peningkatan Ekspor daerah, terkendalinya impor dengan persentase ekspor impor sebesar 12 %

KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan diversifikasi produk dan tujuan ekspor, kerjasama perdagangan dan pengendalian impor	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional - Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan - Program Pengembangan Ekspor (APBN) - Peningkatan peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN)

Sasaran 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha

KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan pelayanan dan perbaikan kualitas SDM dan Laboratorium	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pelayanan kemetrolagian Pontianak- Peningkatan pelayanan kemetrolagian Singkawang- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2013

Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahun 2013 menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2013. Rencana kinerja tersebut disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2013, telah ditetapkan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut :

TABEL 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1. Laju Pertumbuhan sektor Industri Kalbar per tahun	2.76%
	1.2. Jumlah Kawasan Industri yang difasilitasi penumbuhannya	2 Kawasan
	1.3. Penumbuhan dan Penguatan Industri Unggulan Provinsi	2 Unit Usaha
	1.4. Jumlah Alsintan yang diperbaiki / dibuat	10 Unit
2 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	2.1. Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	4.70%

	2.2. Jumlah IKM Kalbar yang mendapat penghargaan baik skala nasional maupun internasional	3 Unit Usaha	
	2.3. Jumlah Pembentukan dan Penguatan sentra / unit usaha IKM	86 Unit Usaha	
	2.4. Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi	30 Unit Usaha	
3	PENINGKATAN EFISIENSI DISTRIBUSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.1. Laju Inflasi Kalimantan Barat	5.47%
4	PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4.1. Jumlah UTTP (alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang wajib Ditera di Pasar Tradisional yang Diawasi	370 UTTP di 5 pasar tradisional
		4.2. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi	6 jenis barang
5	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Kalimantan Barat	12%

Sedangkan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kalimantan Tahun 2013 terkait Bidang Industri dan Perdagangan adalah sbb :

TABEL 2. TARGET SASARAN BERDASARKAN IKU PROVINSI SESUAI RPJMD PROV. KALBAR 2008 – 2013

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2013
1	2	3	4
Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat dengan Pendapatan Perkapita di atas Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	1. Persentase industri sesuai perijinan	%	4,0
	2. Jumlah IKM unggulan	unit	1
	3. Pertumbuhan nilai ekspor-impor	%	12
	4. Jumlah ekspor (devisa)	USD (juta)	1.583,86
	5. inflasi	%	5,47
	6. Nilai perdagangan antar pulau	Rp	12.479.029.336

C. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013

Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan di tahun 2013. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan di tahun anggaran 2013, telah ditetapkan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

TABEL 3. PENETAPAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN UTAMA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1. Laju Pertumbuhan sektor Industri Kalbar per tahun	2.76%	PROGRAM INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH) (APBD)	2,639,632,250
			- Partisipasi Pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi dan Promosi Produk Industri Kimia Agro dan hasil Hutan (IKAHH) Pada BBGRM Tingkat Nasional	155,009,300
	1.2. Jumlah Kawasan Industri yang difasilitasi penumbuhannya	2 Kawasan	- Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri	503,704,500
			- Dukungan Pengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah	224,202,450
	1.3. Penumbuhan dan Penguatan Industri Unggulan Provinsi	2 Unit Usaha	- Penumbuhan Industri Pengolahan Hasil Laut	282,903,500
			- Implementasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Industri	346,026,500
			- Penguatan Teknologi Pengolahan Karet	268,008,550
		- Pengkajian Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	499,897,950	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN UTAMA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	1.4. Jumlah Alsintan yang diperbaiki / dibuat	10 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Industri Pengolahan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret) 159,993,400 - Bantuan Peralatan Industri Pengolahan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret) 199,886,100 <p>PROGRAM INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN ANEKA (ILMEA) (APBD) 589,222,700</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Alsintan Centre 251,615,600 - Pengembangan Industri Kreatif Basis IT 128,281,500 - Rapat Teknis Bidang ILMEA Se Kalbar dan Partisipasi Pada Rakor ILMEA Tingkat Nasional 129,172,600 - Pengembangan Industri Galangan Kapal 80,153,000 	
2 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	2.1. Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	4.70%	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (APBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Pameran Nasional, Festival Maulid dan Daerah 199,799,000 	972,151,050
	2.2. Jumlah IKM Kalbar yang mendapat penghargaan baik skala nasional	3 Unit Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Pameran Produk Unggulan INACRAFT 2013 109,555,250 - Partisipasi Seminar dan Pameran Produk OVOP Internasional 100,700,000 	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN UTAMA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	maupun internasional		- Partisipasi Pameran Aneka Produk Kerajinan Kalbar Pada HUT Gelar Kerajinan Dekranasda dan Taman Mini di Jakarta	97,653,000
	2.3. Jumlah Pembentukan dan Penguatan sentra / unit usaha IKM	86 Unit Usaha	- Dukungan Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Provinsi (Keramik Hias, Halal dan SP-IRT)	113,514,600
			- Pendampingan dan Evaluasi Unit Usaha Baru di Desa Model Pada 5 Kabupaten/Kota (Kerjasama Dengan PKK)	70,461,000
	5.4. Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi	30 Unit Usaha	- Teknologi Pengolahan Mangrove Terpadu di Kab. Pontianak dan Magang di Surabaya	123,618,000
			- Dukungan Konvensi GKM-IKM Tingkat Provinsi dan Nasional	48,429,600
			- Pengembangan IKM Daerah Perbatasan	108,420,600
			PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (APBN)	2,853,000,000
			- Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah	2,853,000,000
3	PENINGKATAN EFISIENSI DISTRIBUSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
	3.1. Laju Inflasi Kalimantan Barat	5.47%	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI (APBD)	988,434,250
			- Fasilitasi Pengolahan Data SIUP dan TDP	43,871,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN UTAMA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota - Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan Pemasaran Produk Kerajinan Kalbar - Partisipasi Pada Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) - Penyelenggaraan Pasar Murah Kerjasama dengan PKK Provinsi - Monitoring Stock Perdagangan Antar Pulau - Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan - Partisipasi Pada Pameran Pangan Nusa - Partisipasi Pada Hari Pertasi Kencana, Lingkungan Hidup dan Pangan Sedunia - Monitoring Perdagangan Gula <p>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH (APBN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah 	<p>49,380,500</p> <p>54,465,300</p> <p>143,632,250</p> <p>363,860,750</p> <p>58,253,150</p> <p>41,344,050</p> <p>113,830,750</p> <p>63,121,500</p> <p>56,675,000</p> <p>1,300,732,000</p> <p>1,300,732,000</p>
4 PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.1. Jumlah UTTP (alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang wajib Ditera di Pasar Tradisional	370 UTTP di 5 Pasar Tradisional	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN (APBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen - Monitoring dan Evaluasi Tera / Tera Ulang dan BDKT 	<p>312,067,250</p> <p>97,902,500</p> <p>144,236,500</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN UTAMA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	
	yang Diawasi				
	3.2. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi	6 Barang Beredar	- Sosialisasi UPTD Metrologi Legal	69,928,250	
5	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	1.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Kalimantan Barat	12%	<p>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (APBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forum Kerja Teknis Ekonomi Sosek Malindo 118,260,500 - Partisipasi Kerjasama Sub Regional BIM EAGA 76,272,500 - Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA) 148,023,250 <p>PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN (APBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor (PPE) di Dalam dan Luar Negeri 349,425,500 - Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED) 280,438,500 - Peningkatan Informasi Ekspor 92,928,000 - Pembinaan Perdagangan Lintas Batas 91,608,000 - Sosialisasi E-SKA 46,574,750 - Pemutakhiran Data Importir 35,570,000 	<p>342,556,250</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN UTAMA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
			- Forum Sinergitas Perdagangan Luar Negeri Produk Hasil Pertambangan	60,084,000
			PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (APBN)	1,175,560,000
			- Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	1,175,560,000

JUMLAH TOTAL ANGGARAN STRATEGIS :

1	PROGRAM INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH) (APBD)	Rp.	2,639,632,250
2	PROGRAM INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN ANEKA (ILMEA) (APBD)	Rp.	589,222,700
3	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (APBD)	Rp.	972,151,050
4	PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (APBN)	Rp.	2,853,000,000
5	PROGRAM PENINGKATAN EFISEINSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI (APBD)	Rp.	988,434,250
6	PROGAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI (APBN)	Rp.	1,300,732,000
8	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN (APBD)	Rp.	312,067,250
9	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (APBD)	Rp.	342,556,250
10	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN (APBD)	Rp.	956,628,750
11	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (APBN)	Rp.	1,175,560,000
		Rp.	12,129,984,500

Sumber Pembiayaan yang berasal dari APBN Kementerian Perdagangan kemudian mengalami revisi Anggaran. Anggaran untuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri turun menjadi RP. 1,130,985,000. Sementara itu Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri turun menjadi Rp. 1,077,944,000. Sedangkan Program Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH) mendapatkan dana ABT sehingga bertambah menjadi RP. 2,719,102,250. Total keseluruhan Anggaran strategis menjadi RP. 12,095,661,500.

Sementara itu dukungan dari UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalimantan Barat di Tahun Anggaran 2013 terhadap pencapaian target indikator kinerja Dinas adalah sebagai berikut:

TABEL 4 DUKUNGAN UPT TERHADAPA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
2 Tumbuh dan Berkembangnya IKM Kalbar	2.1 Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	4,7 %	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	1,449,835,400.00
			(program di bawah UPT UP-IKM)	1,449,835,400.00
			Partisipasi Pada Kegiatan Rakor Penyusunan Program Pembinaan IKM Tingkat Nasional/Regional	27,250,000
			Rekuitmen Peserta Pelatihan CEFE	9,000,000
			Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE	130,000,000
			Pelayanan Klinik Desain Merk,Kemasan dan Haki	45,700,000
			Bimbingan Teknis Penerapan GOOD Manufacturing Practice (GMP)Bagi IKM pangan	50,000,000
			Pendampingan IKM Pasca Pelatihan Pangan dan Kerajinan	15,000,000
			Tes Market (Uji Pasar) Produk IKM Pasca Pelatihan	39,138,000
			Evaluasi Pembinaan Desa Model Untuk Daerah Pesisir Pedalaman, Perbatasan dan Perkotaan Kerjasama dengan PKK Prov. Kalbar	26,300,000
			Widyaloka ke Terminal Kemasan IKM Pangan dan UPT Kerajinan	70,021,400
			Kerjasama Lembaga /Kemitraan Pembina dan Pelaku IKM	21,400,000

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
			Pelatihan Teknis Pengembangan Anyaman Rajut dan Bordir Bagi Perajin IKM Kerjasama Dengan PKK Prov. Kalbar	49,300,000
			Study Teknologi Pengembangan IKM Berbasis Kelapa Sawit	32,174,000
			Pelatihan Teknis Pembuatan Alat Angkut Pertanian/Perkebunan Bermesin Roda Empat	144,800,000
			Pelatihan Teknis Aneka Produk Anyaman Daun dan Pelepah Kelapa Sawit	73,800,000
			Pelatihan Teknis Diversifikasi Produk Kerajinan Rotan/ Bambu Kerjasama dengan dekranasda Prov. Kalbar	79,000,000
			Pengiriman Peserta Diklat Tekhnis/Magang Pengembangan Produk dan Desain Kerjasama dengan Dekranasda Prov.	8,120,000
			Pelatihan Tekhnis Pembuatan Tenun Ikat Motif Khas Kalbar Kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar	64,090,000
			Bimbingan dan Penyuluhan ke Sentra Kerajinan di Kab/Kota Kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar	45,830,000
			Evaluasi dan Monitoring Griya Kerajinan Kalbar di Jakarta Kerjasama Dengan Dekranasda Prov.Kalbar	29,310,000
			Partisipasi Pada pameran Daerah ,Nasional dan Luar Negeri	253,810,000
			Pengembangan Aneka Kerajinan Khas Kalbar	64,550,000
			Fasilitasi Pengelolaan Griya Kerajinan prov. Kalbar	171,242,000
5 Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	12%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN	153,570,000
			kegiatan di bawah UPSMB	153,570,000
			Monitoring Mutu Komoditi Tengawang, Karet / Bokar, Lada dan CPO ke Kab/kota	81,644,000

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
			Pengambilan dan Pengujian Mutu Contoh Garam, AMDK, Pupuk dan Barang Beredar lainnya / SNI wajib di pasar pada kab/kota	71,926,000
6 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat & dunia usaha			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN	2,026,315,550
			UPT KEMETROLOGIAN PONTIANAK	1,408,791,550
			Verifikasi Alat - Alat Standar	53,407,900
			Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP	1,200,809,250
			Survelen	56,613,000
			Uji Banding Kalibrasi	38,688,900
			Penyusunan Data UTTP di 11 Kabupaten / Kota	4,556,250
			Pengelolaan Laboratorium	54,716,250
			UPT KEMETROLOGIAN SINGKAWANG	242,569,500.00
			Pelayanan Tera Ulang UTTP	225,483,500
			Verifikasi Alat Standar	17,086,000
			UPSMB	374,954,500.00
			Monitoring Mutu Komoditi Unggulan Kalbar	40,339,000
			Kaji Ulang Manajemen ISO/BC 17025, 2008	12,313,500
	6.2 Jumlah Alat UTTP yang ditera	27.813 alat UTTP		
		20.313 (pnk)		
		7500 (snk)		
	Akreditasi Laboratorium	2 lab 9 ruang lingkup		

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah komoditi ekspor dan produk wajib SNI yang dimonitor	7 komoditi	Penyempurnaan Dokumen Mutu Laboratorium	11,601,000
			Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian	70,650,000
			Kalibrasi Peralatan Standar	19,854,000
			Re Akreditasi Laboratorium	42,007,000
			Uji Profisiensi laboratorium	15,858,000
			Surveilen Laboratorium	62,968,000
			Pelatihan Teknis Internal untuk Pengujian dan Kalibrasi	89,735,000
			Audit Internal Laboratorium	9,629,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar tahun 2013 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 5 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TA 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	
1 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1. Laju Pertumbuhan sektor Industri Kalbar per tahun	2.76%	4,59%	166,30
	1.2. Jumlah Kawasan Industri yang difasilitasi penumbuhannya	2 Kawasan	3 kawasan	150
	1.3. Penumbuhan dan Penguatan Industri Unggulan Provinsi	2 Unit Usaha	9 Unit usaha	450
	1.4. Jumlah Alsintan yang diperbaiki / dibuat	10 Unit	22 unit	220
2 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	2.1. Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	4.70%	1.40%	29.79
	2.2. Jumlah IKM Kalbar yang mendapat penghargaan baik skala nasional maupun internasional	3 Unit Usaha	2 Unit Usaha	66.67
	2.3. Jumlah Pembentukan dan Penguatan sentra / unit usaha IKM	86 Unit Usaha	213 unit usaha	247,67

		2.4. Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi	30 Unit Usaha	60 unit usaha	200
3	PENINGKATAN EFISIENSI DISTRIBUSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.1. Laju Inflasi Kalimantan Barat	5.47%	9.48%	57.70
4	PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4.1. Jumlah UTTP (alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang wajib Ditera di Pasar Tradisional yang Diawasi	370 UTTP di 5 pasar tradisional	597 UTTP di 5 ps tradisional	161.35
		4.2. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi	6 jenis barang	7 jenis (barang bersertifikat SNI)	116.67
5	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Kalimantan Barat	12%	3,83%	31.92
RERATA PERSENTASE PENCAPAIAN TERHADAP TARGET					139.92

TABEL 6 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012 DAN 2013

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012		2013	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	6	7	8	9
1.	Tumbuh & berkembangnya sektor industri Kalbar	1.1 Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar per tahun	2,76 %	3,1 %	2.76 %	4.29%
		1.2 Jumlah Kawasan Industri yang difasilitasi Penumbuhannya	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	3 kawasan
		1.3 Penumbuhan dan penguatan Industri Unggulan Provinsi	2 (Unit Usaha)	2 (Unit Usaha)	2 (unit usaha)	9(unit Usaha)
		1.4 Jumlah alsintan yang diperbaiki	10 unit	10 unit	10 unit	22 unit
2.	Tumbuh & berkembangnya IKM Kalbar	2.1 Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	4,7 %	4,5 %	4,7%	1,4%
		2.2 Jumlah IKM Kalbar yg. Mendapat penghargaan baik skala nasional maupun internasional	2 unit usaha	-	3 unit usaha	2 unit usaha
		2.3 Jumlah Pebentukan dan Penguatan Sentra/unit usaha IKM	43 unit usaha	56 unit usaha	86 unit usaha	213 Unit usaha
		2.4 Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi	30 Unit Usaha	107 unit usaha	30 unit usaha	60 unit usaha

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012		2013	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
3.	Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	3.1. Laju Inflasi Kalbar	4,47 %	6.62 %	5,47%	9,32%
4.	Peningkatan perlindungan konsumen	4.1 Jumlah UTTP (alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang wajib tera di pasar tradisional yang diawasi	350 UTTP di 5 pasar tradisional	404 UTTP di 5 pasar tradisional	370 UTTP di pasar tradisional	597 UTTP di pasar tradisional
		4.2 Barang beredar dan jasa yang diawasi	6 jenis barang beredar	8 jenis barang beredar	6 jenis barang	7 jenis barang
5.	Peningkatan ekspor daerah & pengendalian impor	5.1 Persentase pertumbuhan nilai ekspor	Ekspor: 1.413,45	Ekspor:1.303,86 (-30,19%)	Ekspor:1,583.86 (12 %)	Ekspor : 1.350,69 (11,52%)

Sementara itu realisasi capaian indicator sasaran strategis UPT di lingkungan Dinas Perindag Prov. Kalbar adalah sebagai berikut:

TABEL 7 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UPT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012		2013	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha	6.1 Akreditasi Laboratorium pengujian	1 lab 5 ruang lingkup	1 lab 5 ruang lingkup	2 lab 9 ruang lingkup	2 lab 9 ruang lingkup
		6.2 Jumlah komoditi ekspor dan produk wajib SNI yang dimonitor	4 komoditi	3 komoditi	7 komoditi	7 komoditi
		6.4 Jumlah alat UTTP yang ditera	31.500 unit	25.445 unit	27.813 unit	23.811 unit

TABEL 8 CAPAIAN SASARAN BERDASARKAN IKU RPJMD PRPV. KALBAR 2008-2013

SASARAN

Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat dengan Pendapatan Perkapita di atas Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum

INDIKATOR KINERJA	2012		2013	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
2	3	4	5	6
1 Persentase industri sesuai perijinan	3,5 %	3,8 %	3,5%	1.40%
2 Jumlah IKM unggulan	2 unit	0	1 unit	2 unit
3 Jumlah ekspor (devisa)) (juta)	USD 1.413,45	USD 1.303,86	USD 1.583,86 (12%)	USD 1.350,69 (3,83%)
4 pertumbuhan nilai ekspor-impur (neraca) USD (juta)	tidak ada dalam iku 2012	764,49	856,23 (12%)	852,57 (11,52%)
5 Inflasi			5.47%	9.48%
6 Nilai perdagangan antar pulau	RP. 12.035.749.942	RP. 11.828.463.825	RP. 12.479.029.336	RP. 12.524.122.535

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis akuntabilitas pencapaian kinerja menjabarkan hasil evaluasi Capaian indikator-indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar menurut sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis dan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Dinas dan diketahui Gubernur dalam Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Analisis capaian kinerja ini dibahas per sasaran strategis yang terbagi dalam tiga misi.

Misi 1. “Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan perindustrian daerah Kalimantan Barat”. Terdiri dari dua sasaran strategis yaitu “Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalbar” dan “Tumbuh dan Berkembangnya IKM Kalbar”.

1 Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalbar

Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 serta realisasi terhadap target dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalbar	1.1. Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	2.76 %	4.59%
		1.2 Jumlah kawasan industri yang difasilitasi penumbuhannya	2 Kawasan	2 kawasan
		1.3 Penumbuhan dan penguatan industri unggulan Provinsi	2 unit usaha	9 unit usaha
		1.4 Jumlah Alsintan yang diperbaiki	10 unit	22 unit

Dalam upaya mencapai target baik sasaran strategis Dinas maupun sasaran strategis RPJMD Prov. Kalbar 2008-2013, Dinas Perindag melaksanakan dua program kegiatan yaitu Program Industri Logam, Mekanik, dan Aneka (ILMEA) dan Program Industri Agro, Hasil, dan Hasil Hutan (IKAHH).

Program ILMEA terdiri dari beberapa kegiatan berikut:

TABEL 9 PROGRAM DAN KEGIATAN ILMEA

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
1	Dukungan Pengembangan Alsintan	Kegiatan pembuatan Alsintan	Kelembagaan Alsintan Center
2	Pengembangan Industri Kreatif berbasis IT	Edukasi pembuatan animasi sederhana	Tumbuhnya industri baru berbasis IT
3	Rapat teknis ILMEA se-Kalbar dan partisipasi pada Rakor IMEA tingkat nasional	sinkronisasi industri ILMEA antara pusat, Provinsi dan kab/kota	Sinkronisasi Program ILMEA

4	Pengembangan Industri Galangan Kapal	program terpadu pengembangan industri galangan kapal Kalbar	Sinkronisasi Industri Galangan Kapal antara Pusat dan Daerah
---	--------------------------------------	---	--

Sumber: DPA-SKPD Dinas Perindag Kalbar TA 2013

Program IKAHH terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut:

TABEL 10 PROGRAM DAN KEGIATAN IKAHH

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
1	Partisipasi pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan promosi Produk IKAHH	Bantuan bahan bangunan dan promosi produk IKAHH Kalbar	Keikutsertaan pada bulan bhakti gotong royong Masyarakat (BBGRM)
2	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri	Tumbuh kawasan industri dan klaster industri hilir kelapa sawit	Pembentukan KI sebagai implementasi kebijakan nasional KI
3	Dukungan pengembangan industri berbasis potensi daerah	Tersusunnya kompetensi inti industri daerah (KIID) di 3 kabupaten	Implementasi kebijakan industri nasional
4	Penumbuhan Industri Pengolahan hasil laut	Sosialisasi penumbuhan industri pengolahan hasil laut	Tumbuhnya wirausaha baru di bidang industri pengolahan hasil laut
5	Implementasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD-GRK) sektor industri	Koordinasi lintas pokja dan identifikasi emisi perusahaan industri serta terselenggaranya mitigasi dampak rumah kaca	Dukungan GRK dari semua kalangan masyarakat
6	Penguatan Teknologi Pengolahan Karet	Bantuan Mesin Pencacah Karet	Implementasi Permen 134 tahun 2010 tentang industri unggulan Kalbar
7	Pengkajian Kompetensi Inti Industri Daerah (KID)	Kompetensi Inti Industri daerah (KIID) di 2 kabupaten	Implementasi Kebijakan Industri Nasional (KIN)
8	Bimbingan Teknis Industri Pengolahan serat sabut kelapa	Bimbingan teknis industri pengolahan serat sabut kelapa berkaret di Kab Sambas	Implementasi Permen 134 tahun 2010 tentang industri unggulan Kalbar
9	Bantuan Peralatan Industri Pengolahan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret)	Bantuan peralatan industri pengolahan serat sabut kelapa berkaret di kab Sambas	Implementasi Permen 134 tahun 2010 tentang industri unggulan Kalbar

Sumber: DPA-SKPD Dinas Perindag Kalbar TA 2013

1.1 LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI KALBAR PERTAHUN

Dilihat dari indikator kinerja makro Dinas Perindag pada sasaran strategis 1 (SS1), yaitu “laju Pertumbuhan Sektor Industri Kalbar” dengan target pertumbuhan 2.76%, realisasi pada tahun 2013 melampaui target secara signifikan dengan pertumbuhan sebesar 4.59 %. Dengan demikian, persentase capaian target pada indikator tersebut sebesar 166,3 %. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 0,68 % terhadap PDRB 2013 Kalbar yang tumbuh sebesar 6,08 %.

Berdasarkan Data BPS Provinsi Kalimantan Barat, Pertumbuhan Industri pengolahan meliputi Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS) serta Industri Mikro dan Kecil (IMK). Sektor industri pengolahan menunjukkan perlambatan pada triwulan III tahun 2013. Tumbuh sebesar 2,87% (yoy), relative lebih lambat dibandingkan periode yang sama di tahun 2012 sebesar 3,13 % (yoy). Perlambatan tersebut dialami baik oleh sektor Industri Mikro Kecil (IMK) maupun Industri Besar sedang (IBS) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 0,51% (yoy) dan 5,22% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan III pada tahun 2012 yang tumbuh sebesar 9,05% (yoy) dan 8,56%(yoy).

Walaupun demikian, pada triwulan IV pertumbuhan Produksi baik IBS maupun IMK mengalami peningkatan. Pertumbuhan Produksi IBS Kalimantan Barat pada Triwulan IV tahun 2013 (y-on-y) mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2012 yaitu sebesar 7,59 %. Sedangkan pertumbuhan produksi IMK Kalimantan Barat pada triwulan IV tahun 2013 (q to q) mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan III tahun 2013. Sebagai tambahan, pertumbuhan IMK pada triwulan IV (y-on-y) turun sebesar 0,13 %.

TABEL 11 PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR TAHUN 2013

KODE KBLI	JENIS INDUSTRI	PERTUMBUHAN (%)			
		q-to-q		y-on-y	
		TW III	TW IV	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6
10	Industri Makanan	5.88	5.97	8.23	10.98
16	Kayu dan Barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman	-2,79	-1,27	-1,62	-2,98
22	Karet, Barang dari Karet dan plastik	0.45	-0.02	-1.62	-0.90
IBS Kalimantan Barat		2.23	3.01	4.08	7.59
IBS Nasional		0.51	0.55	7.21	0.13

*ket: KBLI (Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

Sumber: BPS Kalimantan Barat 2014

Dari Tabel di atas terlihat peranan Industri Makanan (KBLI 10) cukup signifikan dalam pertumbuhan IBS Kalbar. Pada triwulan IV (q-to-q) jenis industri ini tumbuh sebesar 5,97%, sedangkan untuk perhitungan y-on-y tumbuh sebesar 10,98% di mana pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh industri CPO (Crude Palm Oil). Namun demikian, untuk jenis industri yang termasuk dalam KBLI 16 dan KBLI 22 mengalami penurunan, di mana pada triwulan IV q-to-q turun sebesar -1,27% dan -0,02 secara berurutan. Sementara untuk triwulan IV y-on-y turun sebesar -2,98 dan -0,90 secara berurutan.

PERMASALAHAN

Struktur industri Kalbar masih sangat rapuh dan didominasi oleh industri hulu sedang/besar dengan nilai tambah produk yang relatif kecil. Belum termanfaatkan sumber daya alam dan potensi komoditi ekspor lain seperti perikanan, pertambangan serta hasil-hasil pertanian dalam arti luas secara optimal karena keterbatasan teknologi, permodalan, investasi baru di bidang industri, SDM industri yang tidak memadai dan lokasi industri masih terpecah-pecah (tidak terstruktur), industri yang tumbuh di Kalbar baik antara hulu - hilir (maupun antara IKM dan usaha besar) belum terhubung dalam *linkage* yang saling menguntungkan dan interdependensi yang kuat sehingga dapat menguatkan rantai nilai yang ada. Revitalisasi Industri sebagai jawaban atas De-industrialisasi (peranan sektor industri yang

terus menurun) di Kalbar, masih terkendala ketersediaan pelabuhan yang layak, energi khususnya listrik dan infrastruktur penunjang lainnya.

SOLUSI

Percepatan hilirisasi komoditi-komoditi unggulan Kalbar terutama Sawit dan Karet, terutama dengan kebijakan pemerintah melalui Perpres 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, maka Kalimantan Barat ditetapkan sebagai daerah pengembangan industri unggulan Provinsi yaitu karet dan sawit dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Barat (sawit dan karet) yang telah ditetapkan peta jalannya melalui Permen Perindustrian no 134/2010.

Mempercepat pembangunan konektivitas dan koridor ekonomi dengan basis hilirisasi bauksit di Kalbar sesuai Perpres no. 32 tahun 2011 tentang MP3EI 2011-2025 melalui Konsultasi intensif dengan Kementerian terkait.

Mempercepat upaya pembangunan Pelabuhan internasional yang layak dan penyediaan energi untuk hilirisasi bauksit menjadi alumunium (bukan hanya alumina) dan turunannya, sawit dan turunannya, karet dan turunannya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dimasa mendatang adalah dengan aktif melakukan publikasi nasional (media massa nasional) untuk pengembangan ekonomi di Kalbar terutama dalam menyampaikan isu strategis, permasalahan dan kebutuhan akan infrastruktur utamanya pelabuhan internasional yang layak dan energi, untuk menggiring opini nasional terhadap kestrategisan Kalbar dalam hal ekonomi dan politik.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Perindag kalbar sebagai upaya untuk mendorong laju pertumbuhan industri Kalbar adalah sebagai berikut, di mana beberapa kegiatan memiliki indikator kinerja sendiri.

1. Pada tahun 2013, Dinas Perindag Kalbar mengadakan kegiatan **Pengembangan Industri Kreatif Berbasis IT** yang mengundang peserta dari kalangan muda yang berminat di bidang IT khususnya animasi dan tergabung dalam komunitas IT Pontianak (PCA). Kegiatan ini juga mendukung Program Kementerian Perindustrian di mana Pontianak termasuk dalam salah satu kota dalam proyek Regional Information Technology Center of Excellence (RICE). Kegiatan ini bekerja sama dengan Cimahi Creative Association (CCA), sebuah komunitas IT yang dianggap sukses dalam menghasilkan karya dan telah diakui secara internasional.
2. **Kegiatan Pengembangan Industri Galangan Kapal** dilakukan dalam bentuk Workshop dengan maksud untuk membentuk sebuah link/jaringan kerja antara instansi Pembina, pelaku industri (logam) yang saling mendukung. Dalam workshop yang dilaksanakan di Kota Pontianak terungkap dukungan Kementerian Perindustrian RI dalam pengembangan klaster industri perkapalan nasional melalui pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk bahan baku kapal nasional. Selain itu Dirjen IUBBT menyampaikan komitmennya untuk mengadakan kegiatan di Kalimantan Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan pemerintah kab/kota, pelaku usaha industri galangan kapal serta instansi vertikal dari Kementerian Perhubungan.

1.2 JUMLAH KAWASAN INDUSTRI YANG DIFASILITASI PENUMBUHANNYA

1. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri. Kegiatan dimaksud melibatkan tim koordinasi dan melalui beberapa proses kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Tim Koordinasi KI dengan Pemkab Landak, Sanggau, Sambas, serta SKPD Provinsi, Pihak PTPN XIII, PT Pelindo membahas upaya percepatan pembangunan KI di Kalbar terutama terkait dukungan infrastruktur.
- Rapat Tim Koordinasi KI dengan Pemkab Sambas dan KAPET Khatulistiwa membahas tentang pengadaan lahan untuk Kawasan Industri Semparuk.
- Rapat Tim Koordinasi KI dengan Dirlin Industri Agro Kementerian Perindustrian RI membahas tentang pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) di Tayan Kabupaten Sanggau.
- Rapat Tim koordinasi KI dengan Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I dan dihadiri oleh perwakilan Pemkab Ketapang, serta pejabat dilingkungan Bappeda Prov. Kalbar membahas tentang rencana pembangunan kawasan Industri Ketapang yang dimiliki dan dikelola pihak swasta, PT Ketapang Bangun Sarana.
- Rapat Tim Koordinasi KI dengan mengundang Dinas PU Kalbar, KAPET Khatulistiwa, dan 7 kabupaten/kota membahas tentang upaya percepatan pembangunan kawasan industri di Kalbar terutama aspek penyiapan lahan dan kesesuaian terhadap RTRW.
- Dari tiga kawasan Industri yang difasilitasi telah disusun Renstra dan Master Plan untuk dua kawasan yaitu KI Mandor (KIM) dan KI Tayan (KIT), sementara untuk KI Semparuk (KIS) masih terkendala ketercukupan lahan. Terkait dengan capaian IKU Dinas, "Jumlah Kawasan Industri yang difasilitasi penumbuhannya", dari target sejumlah 2 kawasan, telah difasilitasi 3 kawasan sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian melebihi target dengan persentase sebesar 150 %.

2. Dukungan Pengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah. Terdiri dari berbagai sub kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Sinkronisasi Kompetensi Inti daerah, mengundang Tenaga Ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kegiatan dihadiri oleh unsur Bappeda dari seluruh Pemda Kabupaten/kota se Kalbar, Dinas yang membidangi industri serta Setda Kabupaten/Kota bagian ekonomi.
- Kegiatan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan penyusunan KIID di kabupaten Landak, Kapuas Hulu, Sanggau, dan Sintang. pada kegiatan tersebut Penyusunan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Sintang dan Sanggau sudah memasuki tahap finalisasi Peraturan Menteri, sedangkan KIID Kabupaten Landak dan Kapuas Hulu dalam tahap penyusunan Road Map untuk selanjutnya diuji oleh Tim Ahli Kementerian Perindustrian RI.

- Konsultasi dan Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian RI terkait KIID menghasilkan komitmen Ditjen Fasilitasi Pengembangan Perwilayahan Industri untuk untuk membiayai Pengkajian dan Penetapan KIID di Kabupaten Landak dan Kapuas Hulu.

PERMASALAHAN

belum adanya perusahaan atau investor baik asing maupun dalam negeri yang bersedia menjadi champion dalam pengelolaan kawasan industri di Kalbar.

Permasalahan lahan yang belum sepenuhnya terselesaikan menjadi kendala dalam pengembangan kawasan industri.

Infrastruktur yang belum mendukung terutama terkait dengan energy, listrik, transportasi, serta pelabuhan.

SOLUSI

Permasalahan Calon Kawasan Industri (KI) Tayan telah dilakukan dengan mengusulkan PTPN XIII untuk menjadi champion, memasukkan usulan terkait pembentukan KI didalam program instansi terkait dan telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan akan dikaji lebih lanjut Penetapan lokasi Tayan sebagai Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional Tahun 2014 oleh Kemenperin RI.

Sedangkan pemecahan permasalahan calon KI Mandor adalah dengan upaya untuk segera dibuat surat penetapan lahan oleh Bupati, mencari investor untuk menjadi champion yang berkoordinasi dengan Kemenperind, serta memasukkan usulan pembentukan KI Mandor didalam program kegiatan instansi terkait.

1.3 PENUMBUHAN DAN PENGUATAN INDUSTRI UNGGULAN

1. **Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi** dilaksanakan pada bulan Mei 2013 mengambil tempat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Sementara kegiatan BBGRM Tingkat Nasional X dilaksanakan di Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan. Dinas Perindag berpartisipasi dalam kegiatan tersebut untuk mendukung Time Penggerak PKK Provinsi Kalbar dan Kab. Sanggau mempromosikan berbagai jenis produk agro (makanan dan minuman) serta kerajinan berbahan dasar hasil hutan.
2. **Penumbuhan Industri Pengolahan Hasil Laut.** Kegiatan ini dilakukan di tiga kabupaten; *Kayong Utara, Sambas, dan Kabupaten Pontianak*. Kegiatan berupa bantuan peralatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kelompok usaha serta dibekali dengan bimbingan teknis penggunaan peralatan tersebut. Selain itu, kegiatan melibatkan Pihak Politeknik Negeri Pontianak dalam sosialisasi pengolahan hasil laut, dengan tujuan untuk menambah wawasan dan motivasi kelompok usaha penerima bantuan sehingga dapat menghasilkan produk yang beragam dan dapat bersaing di pasar.
3. **Implementasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Industri.** Didasari oleh Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional dan Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang kemudian di break down dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Perindag berperan sebagai ketua pokja industri. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi kepada pelaku industri seperti PT Alas Kusuma dan beberapa perusahaan Karet (crumb rubber) yang ada di sekitar kota Pontianak.
- Pemantauan terhadap beberapa perusahaan seperti PT Alas Kusuma, PT NKP, PT Kuangken Crumb Rubber dan PT Sumber Djantin.
- Pengadaan alat pengukur Emisi untuk mengetahui tingkat emisi yang dihasilkan oleh suatu kegiatan industri.
- Rapat-rapat koordinasi, loka karya, workshop, yang dilaksanakan oleh tim RAN-GRK.

4. Penguatan Teknologi Pengolahan Karet. Kegiatan dimaksud terdiri dari:

- Penyerahan bantuan alat pencacah jinton disertai dengan kegiatan uji coba penggunaan alat yang dilaksanakan di Pabrik Mini Compo Creepe di [Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado](#).
- Pendampingan Bimbingan teknis Penggunaan mesin compound dan vulkanisir ban yang dilaksanakan di Pabrik Mini Compo Creepe [Koperasi Surya Alam Desa Sungai Pangkalan Kabupaten Bengkayang](#).
- Penyerahan bantuan alat mixer latek pekat dan Bimbingan Teknis peningkatan mutu lateks pekat, serta pembuatan produk berbasis latek pekat yang dilaksanakan di Kecamatan Mandor kab. Landak. Bantuan peralatan diberikan kepada [Gapoktan Cahaya Fajar](#).

5. Bimbingan Teknis Industri Pengolahan Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret). Kegiatan ini dilaksanakan terhadap [kelompok Usaha Bersama Kelapa Mas](#) dengan mendatangkan Instruktur dari Balai Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Jawai kabupaten Sambas.

6. Bantuan Peralatan Industri Pengolahan Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret). Bantuan Peralatan diserahkan kepada [Kelompok Usaha Bersama Kelapa Mas Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas](#). Kegiatan ini dikaitkan dengan kegiatan Bimbingan teknis Industri Pengolahan Sabutret.

7. Kajian Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID). Pengkajian Kompetensi Inti Industri Daerah dilaksanakan di [dua kabupaten yaitu Kubu Raya dan Pontianak](#). Pengkajian dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini oleh pihak konsultan. Dengan kajian tersebut diharapkan kedua kabupaten dapat menyusul kabupaten lainnya untuk penyusunan KIID.

Realisasi yang dicapai sebesar 9 unit usaha yaitu 3 Kelompok usaha pengolahan hasil laut di kabupaten Pontianak, Kayong Utara, dan Sambas, kelompok usaha Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado dan Koperasi Surya Alam Pangkalan Kabupaten Bengkayang, Gapoktan Cahaya Fajar di kec. Mandor Kabupaten Landak, serta Kelompok Usaha Bersama Kelapa Mas Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas. **Sehingga realisasi melampaui target dengan persentase sebesar 450 %.**

PERMASALAHAN

Lemahnya kemampuan dan motivasi untuk mengelola usaha terutama usaha compo creepe sehingga sangat tergantung pada pemerintah daerah.

Sulitnya memperoleh bahan-bahan kimia penolong yang diperlukan dalam pembuatan compound padat dan belum adanya tenaga ahli dalam pembuatan compound daerah.

Kurangnya motivasi dalam mengembangkan industri pengolahan latek selain dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan-bahan kimia penolong juga disebabkan belum berkembangnya industri di daerah yang memerlukan lateks.

Masih lemahnya komitmen para pengambil kebijakan di daerah terkait dengan pengembangan industri daerah.

SOLUSI

Dalam rangka percepatan pengembangan industri di daerah sangat diperlukan kreatifitas dan inovasi serta komitmen yang tinggi, untuk itu mutlak adanya upaya secara terus menerus peningkatan kompetensi SDM aparatur dan pelaku industri

Pemberian informasi dan wawasan serta pengetahuan kepada para pengambil kebijakan di daerah harus dilakukan secara sistematis dan intensif serta mampu menumbuhkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam sehingga adanya komitmen tinggi pula.

Secara bertahap perlu segera dilakukan penyediaan sarana mobilitas untuk kelancaran aktivitas ke lapangan dalam melakukan pembinaan terhadap industri di daerah.

Guna menjamin efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan maka perlu dibangun sinergisitas antar program dan kegiatan, dalam artian setiap kegiatan industri didalam perencanaannya harus sudah termasuk prospek dan akses pemasaran terhadap produk industri yang dihasilkan.

1.4 JUMLAH ALSINTAN YANG DIPERBAIKI

Workshop Alsintan Center Kalbar terletak di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya memiliki misi sebagai penggerak utama untuk pembangunan agribisnis dan agro industri di Provinsi Kalimantan Barat. **Kegiatan Dukungan Pengembangan Alsintan** merupakan salah satu bagian dalam upaya untuk mendukung pengembangan industri Alsintan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Teknis Produksi IKM Alsintan dengan menghasilkan 1 unit mesin Prototype Traktor 4 roda 4 WD dan perbaikan kurang lebih 20 peralatan ALSINTAN. Adapun satu unit Prototype Traktor merupakan hasil pengembangan Unit Pelatihan IKM. **Jika dihubungkan dengan pencapaian IKU Dinas "Jumlah alsintan yang**

diperbaiki/dibuat” , target yang ditetapkan sejumlah 10 unit alsintan terlampaui sebesar 220 % atau 22 unit.

PERMASALAHAN

Dalam rangka mendukung program pengembangan Alsintan, setidaknya harus didukung dengan sebuah lembaga setingkat UPT yang menangani langsung Alsintan Center.

SOLUSI

Bersama-sama dengan Biro Ekbang Sekretariat, BAPPEDA dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, didukung oleh Kemenko Perekonomian serta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian, telah dilakukan upaya perpanjangan MOU untuk tetap melanjutkan pengembangan Alsintan Centre kalbar sebagai salah satu pusat percontohan Alsintan Centere nasional di luar Pulau Jawa, serta terus giat mendorong dibentuknya UPT Alsintan.

2 Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalbar

Target serta indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 (SS2) dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalbar	2.1 Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	4,7 %	1,4 %
		2.2 Jumlah IKM yang mendapat penghargaan baik skala nasional maupun	3 Unit usaha	2 Unit usaha
		2.3 Jumlah pembentukan dan penguatan sentra/unit usaha IKM	86 unit usaha	213 unit usaha
		2.4 Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi	30 unit usaha	30 unit usaha

Sementara indikator RPJMD Kalbar 2008-2013 yang bersinggungan dengan SS 2 dengan sasaran strategis Provinsi **“Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan perkapita di atas rata-rata kebutuhan hidup minimum”** tersaji dalam tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Persentase industri sesuai perijinan	3,5 %	1,4 %
jumlah IKM unggulan	1 Unit usaha	2 Unit usaha

Program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai SS2 terutama yang dibiayai oleh APBD seperti dalam tabel berikut:

TABEL 12 PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN IKM KALBAR

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
1	Partisipasi Pameran Nasional, Festival Maulid dan Daerah	Adanya promosi komoditi unggulan Kalbar	Komoditi Kerajinan unggulan Kab./Kota se Kalbar dapat di promosikan pada event Pameran
2	Partisipasi Pameran Produk Unggulan INACRAFT 2013	Adanya promosi komoditi unggulan Kalbar	Komoditi kerajinan unggulan Kab./Kota se Kalbar promosi di tingkat Nasional
3	Partisipasi Seminar dan Pameran Produk OVOP Internasional	Adanya promosi komoditi unggulan Kalbar di tingkat luar negeri	Komoditi kerajinan unggulan Kab./Kota se Kalbar dan promosi pameran di tingkat luar negeri
4	Partisipasi Pameran aneka Produk Kerajinan Kalbar Pada HUT Gelar Kerajinan Dekranasda dan Taman Mini di Jakarta	Terlaksananya Kerjasama dengan indag pada promosi dan pameran produk IKM/ kerajinan Kalbar	Promosi dan pameran produk IKM / Kerajinan Kalbar tingkat Nasional oleh Dekranasda
6	Dukungan Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Provinsi (Keramik Hias dan Halal, Merek, Paten dan SP-IRT)	Sosialisasi UPL dan Pendampingan IKM Unggulan di Kalbar oleh UPL	Pengetahuan UPL dan Perbaikan Kinerja Sentra IKM
7	Pendampingan dan Evaluasi Unit Usaha Baru di Desa Model pada 5 Kab./Kota (Kerjasama dengan PKK)	Monev desa Model di 5 Kab./ Kota kerjasama dengan PKK provinsi	Adanya Hasil evaluasi kegiatan unit usaha baru di desa model
8	Teknologi Pengolahan Mangrove Terpadu di Kab. Pontianak dan Magang di Surabaya	Penguasaan proses dan teknologi pengolahan hasil industri mangrove	Alih teknologi pengolahan Industri hasil mangrove
9	Dukungan Konvensi GKM-IKM Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya peserta Gugus pada konversi GKM tingkat Nasional di Jogjakarta	Adanya GKM IKM Kalbar yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional
10	Pengembangan IKM Daerah Perbatasan	Terlaksananya sosialisai keamanan pangan di daerah perbatasan Sanggau dan Bengkayang	pelaku dan aparat yang paham tentang keamanan pangan di daerah perbatasan Entikong (Sanggau) dan Jagoi Babang (Bengkayang)

Sumber: DPA-SKPD 2013

Selain program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, pencapaian SS2 ini juga didukung oleh program dan kegiatan APBN “ **Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM**”, dengan kegiatannya adalah “**Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan menengah Wilayah 1**”. Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut adalah pertumbuhan dan pengembangan IKM Kalbar.

2.1 PERSENTASE JUMLAH PERTUMBUHAN IKM KALBAR

Indikator Kinerja di atas merupakan indikator Dinas dan pada hakekatnya juga merupakan Indikator kinerja Provinsi “**persentase industri sesuai perijinan**” sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2008-2013. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan mengenai

target kinerja, di mana pada target dinas ditetapkan sebesar 4,7% sedangkan pada target Provinsi ditetapkan sebesar 3,5 %. Terlepas dari perbedaan tersebut, Indikator tersebut esensinya dapat dipersepsikan sebagai indikator kinerja makro terkait pertumbuhan IKM di Kalimantan Barat. Pada tahun 2013, berdasarkan data perkembangan Industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan perdagangan Prov. Kalbar, terjadi peningkatan pertumbuhan IKM sebesar 1,4% terhadap Jumlah IKM pada tahun 2012. Namun demikian, angka pertumbuhan tersebut masih di bawah target yang ditetapkan baik untuk target dinas maupun target provinsi. Persentase pencapaian target Dinas sebesar 30% sedangkan terhadap target Provinsi persentase pencapaian target menjadi sebesar 40%.

TABEL 13 PERKEMBANGAN IKM KALIMANTAN BARAT

URAIAN	INDUSTRI KECIL MENENGAH				
	2009	2010	2011	2012	2013
Unit Usaha	1.755	1.790	1.826	1.899	1.925
TK (orang)	11.937	12.175	12.419	12.915	12.955
Investasi (Rp. Juta)	83.931	85.610	87.322	90.815	91.954

Sumber: Dinas Perindag Kalbar

Kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan IKM Kalbar adalah dengan berpartisipasi pada pameran baik di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa event pameran yang diikuti selama tahun 2013 adalah Partisipasi Pameran Nasional Festival Maulid dan Daerah, Partisipasi Pameran Produk Unggulan INACRAFT, Partisipasi Pameran Aneka Produk Kerajinan Kalbar pada HUT Gelar Kerajinan Dekranasda. Secara umum tujuan mengikuti pameran tersebut adalah sekaligus menginventaris keragaman produk khas Kalbar, arena promosi produk IKM kerajinan baik sandang maupun pangan, serta menciptakan jaringan kerja antara pelaku IKM, stakeholder, dan pasar.

2.2 JUMLAH IKM YANG MENDAPAT PENGHARGAAN

Indikator di atas memiliki esensi yang sama dengan indikator provinsi “**Jumlah IKM Unggulan**”. Namun demikian terjadi perbedaan pada penetapan target, di mana target Dinas ditetapkan sebesar 3 unit usaha sedangkan pencapaian realisasi sebesar 2 unit usaha atau 66,67%. Jika dibandingkan dengan target Provinsi yang sebesar 1 unit usaha maka pencapaian menjadi melebihi target sebesar 200 %. Dua unit usaha IKM yang dimaksud adalah **I SUN VERA** (Nata de Aloevera) dan **ROTIKU HIDUP** (Nata de Aloevera) yang keduanya berlokasi di Kota Pontianak. Kedua Unit Usaha tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian RI pada tahun 2013 sebagai Produk One Village One Product (OVOP). Sebagai tambahan I SUN VERA berhasil menyabet juara 2 tingkat nasional lomba usaha kecil dan menengah (UKM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI pada tahun 2013.

Permasalahan serta solusi terhadap indikator ini tidak berbeda dengan indikator 2.2.

2.3 JUMLAH PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN SENTRA/UNIT USAHA IKM

Dukungan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan berikut:

- **Teknologi Pengolahan Mangrove Terpadu.** Kegiatan ini dilatar belakangi dengan pentingnya peranan hutan mangrove Kalimantan Barat. Maksud dan tujuan kegiatan

ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai mangrove kepada pelaku IKM, serta pembentukan jaringan kerja yang lebih baik antara Instansi Pembina dan pelaku IKM. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Pontianak, dengan menampilkan narasumber yang berasal dari Surabaya.

- **Dukungan Konvensi GKM IKM Tingkat Provinsi dan Nasional.** Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tahun 2013 dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dengan diikuti oleh delapan kabupaten/kota dengan jumlah gugus dan risalah sebanyak 10 unit.
- **Pengembangan IKM daerah Perbatasan.** Kegiatan ini dilakukan di daerah perbatasan yang berlokasi di kabupaten Sanggau dan Bengkayang. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya di perbatasan mengenai bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan. Kegiatan ini mengundang Ahli dari Balai Besar POM Pontianak.
- **Dukungan Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Provinsi (Keramik Hias dan Halal, Merek, Paten dan SP-IRT).** Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk memberikan dukungan operasional di 14 kabupaten/kota terkait pengembangan TPL, UPL, sentra keramik hias di Kota Singkawang, sertifikasi halal bagi IKM pangan, Penerbitan paten serta SP-IRT.

Kurang lebih 213 unit usaha tersentuh dan mendapatkan manfaat dari kegiatan di atas. Jika dibandingkan dengan target sebesar 86 unit usaha, persentase capaian sebesar 247,67 %.

2.4 JUMLAH IKM YANG MENDAPATKAN SERTIFIKASI

Di tahun 2013, jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat berupa sertifikat Halal dan SP-IRT kurang lebih berjumlah 60 unit usaha dengan target sebesar 30 unit usaha. Sehingga persentase capaian sebesar 200 %. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan **Dukungan Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Provinsi (Keramik Hias dan Halal, Merek, Paten dan SP-IRT)** serta kegiatan **Sosialisasi Sertifikasi Halal** yang dilaksanakan bekerja sama dengan LP POM MUI dan Balai POM Kalimantan Barat.

Selain kegiatan-kegiatan di atas (APBD) sebagai kegiatan utama dalam penilaian LAKIP ini, Dinas Perindag Prov. Kalbar juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana Dekonsentrasi (APBN) serta Kegiatan-kegiatan Unit Pelayanan Teknis, UPT-UP IKM.

Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM (APBN) dengan output kegiatan pengembangan sentra IKM melalui OVOP (one village one product), Penumbuhan dan Pengembangan IKM melalui kewirausahaan, Fasilitasi peningkatan pelayanan IKM, operasional Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL) IKM, Promosi dan sertifikasi produk IKM serta pengembangan sistem mutu IKM, dan pengembangan database IKM Kalbar

Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (UP-IKM APBD) dengan target kinerja peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan IKM Kalbar didukung dengan 22 kegiatan. Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan Unit Pelatihan Industri Kecil dan Menengah di bawah Disperindag Prov. Kalbar yang memfokuskan pada pengembangan pelatihan IKM.

PERMASALAHAN

Kinerja IKM jika dibandingkan dengan dengan kinerja Industri Besar dan sedang (IBS) sangatlah kecil. Permasalahan-permasalahan yang membelit IKM masih begitu banyak diantaranya permasalahan teknologi, permodalan, manajemen pemasaran, kesulitan dalam akses kredit perbankan, serta masalah lingkungan.

SOLUSI

Aspek Managerial. peningkatan produktivitas/omzet/tingkat utilisasi dengan meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan SDM.

Aspek Permodalan. Mencarikan bantuan modal melalui BUMN umpamanya, kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit mini/midi, KKU)

Pengembangan program kemitraan misalkan dengan konsep Bapak-Anak angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura.

Pengembangan sentra industri kecil, misalnya dengan model Pemukiman industri Kecil (PIK), LIK (lingkungan Industri Kecil), SUIK (sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT dan Tenaga penyuluh industri (TPI)

Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu melalui KUB (kelompok usaha bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Misi 2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberi kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan.

Dengan tiga sasaran yaitu “Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri, peningkatan perlindungan konsumen, serta Peningkatan ekspor dan pengendalian impor”

3 Peningkatan Efisiensi Distribusi Perdagangan Dalam negeri

Indikator kinerja serta target tahun 2013 Dinas adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3	Laju inflasi Kalimantan Barat	3.1 Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	5,47 %	9,4 %

Sementara Indikator kinerja serta target tahun 2013 Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan perkapita di atas rata-rata	laju Inflasi Kalimantan Barat	5,47 %	9,4 %
		Nilai Perdagangan antar Pulau	RP..	RP..
			12.479.029.336	12.524.122.515

3.1 LAJU INFLASI KALIMANTAN BARAT

TABEL 14 PROGRAM DAN KEGIATAN EFISIENSI DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
1	Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP dan TDP	Pengolahan/Pengumpulan data SIUP dan TDP dari Kab/Kota	Data SIUP dan TDP dari 7 Kabupaten/ Kota
2	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kab/Kota	Pengolahan/Pengumpulan data perkembangan pembangunan pasar dari Kab/Kota	Data Perkembangan Pembangunan Pasar dari 7 Kabupaten/ Kota
3	Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan Pemasaran Produk Kerajinan Kalbar	Sarana Pemasaran produk kerajinan/handycraft Kalbar	Perluasan pangsa dan segmen pemasaran bagi produk kerajinan/handycraft Kalbar serta peningkatan jumlah pemasaran kerajinan Kalbar
4	Partisipasi pada Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ)	Terlaksananya partisipasi produk Kalbar pada PRJ	Promosi produk kalbar bagi buyer di dalam negeri pada event nasional di
5	Penyelenggaraan Pasar Murah	Penyelenggaraan pasar murah	Pasar murah di 9 Kabupaten/Kota
6	Monitoring Stock Perdagangan Antar Pulau	Tersedianya dat stock kebutuhan barang pokok & strategis masyarakat	Data stock barang pokok dan strategis antar pulau yang akurat
7	Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan	Monitoring dan Pengawasan Barang-barang Dalam Pengawasan	Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Barang-Barang Dalam
8	Partisipasi Pada Pameran Pangan Nusa	Terlaksananya partisipasi promosi produk pangan Kalbar pada Pameran Pangan Nusa	Promosi produk pangan kalbar bagi buyer di dalam negeri pada event nasional di dalam negeri
9	Partisipasi pada Pertasi Kencana, Lingkungan Hidup dan Pangan Sedunia	Penyelenggaraan Pasar Murah pada Hari Pertasi Kencana, Lingkungan Hidup dan Pangan Sedunia	Tingkat daya beli masyarakat
10	Monitoring Perdagangan Gula	Tim monitoring perdagangan gula terpadu di Kalimantan Barat	Pengawasan terhadap perdagangan gula melalui impor maupun perdagangan antar pulau

Sumber: DPA-SKPD 2013

Laju inflasi Kalimantan Barat pada tahun 2013 tumbuh sebesar 9,45 % jauh diatas target sebesar 5,47 %. Penilaian inflasi didasarkan pada data dua kota di kalbar yaitu Pontianak dan Singkawang. Kelompok perumahan, air, Listrik, gas, dan bahan bakar memberi kontribusi terbesar dengan laju inflasi mencapai 12,21% pada tahun 2013, disusul oleh sektor bahan makanan dengan laju inflasi sebesar 9,82%.

TABEL 15 INFLASI KOTA PONTIANAK MENURUT KELOMPOK

No	Kelompok	2011	2012	2013
	umum	4,91	6,62	9,4
1	Bahan Makanan	5,40	10,03	9,82
2	Makanan jadi, minuman, rokok, dan Tembakau	6,43	2,61	7,36
3	Perumahan, air, listrik, gas & bahan Bakar	4,93	6,86	12,21
4	Sandang	2,34	4,39	3,32
5	Kesehatan	4,78	8,16	9,81
6	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	1,90	0,82	8,68
7	Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan	4,50	8,31	8,95

Sumber; BPS 2013

PERMASALAHAN

Kalimantan Barat mengalami puncak inflasi pada awal triwulan III tahun 2013. Hal itu dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diberlakukan penuh pada akhir triwulan II. Puncak inflasi juga dipengaruhi oleh even keagamaan seperti puasa, lebaran, sembayang kubur serta pilkada. Selain itu tingginya inflasi juga dipengaruhi oleh kurang menunjangnya system jaringan infrastruktur di Kalimantan Barat terutama jalan raya yang berakibat pada kondisi harga-harga distribusi (pengangkutan) yang berefek pada harga-harga barang atau produk (terkendalanya system distribusi logistic Kalbar).

SOLUSI

Pengendalian Inflasi Kalimantan Barat tentunya tidak dapat diatasi oleh Dinas Perindag sendiri. Di Kalimantan Barat sendiri sudah dibentuk Tim Pengendali Inflasi daerah yang berkoordinasi dengan asosiasi pedagang, KADIN, Bank Indonesia, Bulog, Pelindo, produsen bahan pokok, Kepolisian, serta pertamina. Kedepannya penguatan koordinasi tersebut perlu diperkuat. Selain itu, pembenahan sistem logistik daerah Kalbar perlu terus digiatkan. Sebagai tambahan, pengembangan sistem resi gudang Kalbar diharapkan dapat serta menghambat laju inflasi.

3.2 NILAI PERDAGANGAN ANTAR PULAU

Sebagai negara kepulauan, peranan perdagangan antar pulau akan semakin krusial, terutama dalam menghadapi AEC 2015. Khusus nya Kalimantan Barat, yang realisasi PAP nya sebesar RP.. 12.524.122.515 hanya sedikit di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar RP.. 12.479.029.336 sangat jauh jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang mencapai 30 triliun rupiah menjadi tantangan yang lumayan berat.

PERMASALAHAN

Disadari, persoalan Perdagangan Antar Pulau (PAP) tidak terlepas dari persoalan infrastruktur dan birokrasi. Pada era AEC nanti, pengusaha dari negara-negara ASEAN dapat mengeksport langsung produknya ke setiap wilayah provinsi atau kabupaten di Indonesia melalui setiap pelabuhan yang tersebar di wilayah Indonesia. Tanpa pembenahan kedua hal yang telah disebutkan sebelumnya, barang-barang yang berasal dari luar akan lebih murah bila dibandingkan dari sesama wilayah Indonesia. Tercecernya perdagangan antar pulau menjadi titik lemah Indonesia dalam menghadapi AEC.

SOLUSI

Penguatan data terkait PAP yang bersinggungan dengan Kalbar menjadi sangat penting. Data PAP yang berisi informasi yang melingkupi asal barang, jenis barang, neraca PAP, daerah tujuan produk Kalbar akan menjadi informasi yang sangat strategis sebagai sebuah peta panduan dalam menentukan kebijakan perdagangan Kalbar, terutama dalam peningkatan kerja sama perdagangan antar daerah.

Sementara itu, upaya-upaya sektoral yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dalam pengendalian inflasi serta peningkatan PAP direalisasikan dalam program **Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri** di tahun 2013 dijabarkan dibawah ini. Namun demikian, dengan jumlah anggaran dan kekuatan SDM serta Kewenangan yang ada pada Dinas Perindag Kalbar, tentunya menjadi sebuah harapan yang absurd jika segala usaha atau kegiatan tersebut dianggap dapat menuntaskan persoalan Kalbar terkait dua indikator tersebut (pengendalian inflasi dan peningkatan PAP).

1. **Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP dan TDP.** Kegiatan dilakukan di tujuh kabupaten/kota dengan tujuan untuk memperoleh update data mengenai SIUP dan TDP sehingga dapat di pantau perkembangan usaha perdagangan.

PERMASALAHAN

Kewenangan penerbitan SIUP dan TDP bukan berada di bawah Dinas kabupaten/kota yang membidangi industri, melainkan di bawah instansi perijinan satu atap. Hingga hari ini belum ada semacam nota kerjasama atau koordinasi di antara kedua instansi tersebut, sehingga Dinas yang membidangi industri kesulitan untuk mendapatkan data SIUP atau TDP.

SOLUSI

Koordinasi atau kesepakatan dalam rangka pendataan SIUP dan TDP mutlak diperlukan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perindag Provinsi harus segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi tersebut.

2. **Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar.** Kegiatan dilakukan untuk memantau sejauh mana pembangunan pasar tradisional di kabupaten/kota penerima DAK Kementerian Perdagangan RI. Kegiatan ini sekaligus untuk mendata perkembangan pasar tradisional di Kabupaten/kota.
3. **Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar.** Dalam Rangka Perluasan Pemasaran Produk Kerajinan Kalbar dengan output kegiatan berupa 1 buah griya yang berlokasi di Bali yang merupakan tujuan utama pariwisata dunia. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perluasan pangsa dan segmen pemasaran produk kerajinan/handycraft Kalbar serta peningkatan jumlah pemasaran kerajinan Kalbar.
4. **Partisipasi pada Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ)** Dengan pertimbangan PRJ merupakan even perdagangan terbesar di Indonesia, sehingga diharapkan menjadi wadah yang sangat efektif untuk memasarkan dan memperkenalkan produk-produk Kalimantan Barat, terutama yang dihasilkan oleh sektor industri kecil dan menengah. Selain PRJ, Dinas Perindag juga berpartisipasi pada Pameran dalam rangka memperingati **Hari Pangan Nusa**.

5. **Penyelenggaraan Pasar Murah.** Kegiatan dilakukan di sembilan kab/kota dengan maksud untuk meringankan beban masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan menekan laju inflasi pada waktu tertentu, terutama pada hari-hari menjelang perayaan keagamaan. Penyelenggaraan pasar murah juga diadakan pada even **pertasi kencana, lingkungan hidup, dan pangan sedunia.**

6. **Monitoring dan Pengawasan Barang – barang dalam Pengawasan.** Pengawasan dilakukan terhadap barang-barang terkait dengan aspek keselamatan, kemanan, kesehatan konsumen dan lingkungan hidup, dibutuhkan oleh orang banyak, serta SNI nya telah diberlakukan. Barang-barang yang diawasi dengan kriteria antara lain; barang yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar, barang yang diatur tata niaganya dsb.

PERMASALAHAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar belum memiliki tenaga PPBJ (petugas pengawas barang dan jasa) serta tenaga PPNS Perlindungan Konsumen.

SOLUSI

Pengiriman SDM untuk pelatihan serta registrasi PPNS dan PPBJ serta peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat tentang barang-barang dalam berada dalam pengawasan sesuai regulasi yang berlaku.

7. **Monitoring Perdagangan Gula.** Kegiatan ini dilakukan menanggapi polemik perdagangan gula di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu produk yang tata niaganya diatur dalam Keputusan Presiden No 58 Tahun 2004. Tim yang dibentuk merupakan Tim lintas sektor yang di arahkan langsung oleh Bapak Gubernur Kalbar.

PERMASALAHAN

Masalah Tata niaga Gula Kalimantan Barat merupakan persoalan bersama bukan hanya terbatas pada pemerintah daerah, melainkan bersentuhan dengan instansi pusat baik pada yang berkenaan dengan regulasi distribusi maupun instansi yang melaksanakan regulasi pengawasan dan penegakan hukum.

SOLUSI

Perlu dibentuk semacam satuan tugas (satgas) pengendalian Tata niaga Gula Kalbar yang terdiri dari seluruh stakeholder terkait dari semua tingkatan pemerintahan.

8. **Monitoring Stok Perdagangan Antar Pulau.** Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan database ketersediaan data stok kebutuhan barang pokok dan strategis masyarakat selama 1 tahun. Database tersebut akan dijadikan acuan untuk pengembangan system distribusi logostik daerah dan juga nasional dan pengendalian ketahanan bahan pokok daerah.

PERMASALAHAN

Belum adanya koordinasi yang erat dengan pihak Adpel (administrasi Pelabuhan) yang bertanggung jawab dalam inventarisasi keluar masuknya barang di pelabuhan-pelabuhan Kalimantan Barat sedikit menyulitkan dalam update data.

Perlu disusun semacam nota kerja sama antara Dinas Perindag Kalbar dengan pihak Administrasi Pelabuhan dalam kegiatan ini di masa datang.

Selain itu, Dinas Perindag Kalbar pada tahun 2013 juga didukung oleh APBN dalam bentuk **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri daerah** dengan output kegiatan laporan informasi harga bahan pokok, dukungan operasional kegiatan pasar murah, Partisipasi pada promosi dagang nasional, peningkatan kemampuan dagang kecil dan menengah dan perlindungan konsumen

4 Peningkatan dan perlindungan konsumen

Indikator kinerja beserta target terhadap sasaran strategis 4 (SS 4) adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
4	Peningkatan dan Perlindungan Konsumen	4.1 Jumlah UTTP yang wajib ditera di pasar tradisional	370 UTTP di 5 pasar di kota Pontianak	597 UTTP di 5 pasar di kota Pontianak
		4.2 Barang beredar dan Jasa yang diawasi	6 jenis barang (SNI)	7 jenis barang (SNI)

Dukungan program dan kegiatan tahun 2013 Dinas Perindag Kalbar dalam mencapai sasaran strategis 4 serta dua indikator kinerja tersebut adalah tercantum dalam tabel berikut:

TABEL 16 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

No	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
1	Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kabupaten/Kota	Peredaran Barang sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada
2	Monitoring dan evaluasi Tera/Tera Ulang dan BDKT	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tera/Tera Ulang dan BDKT	Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Pasar Tradisional dan Modern
3	Sosialisasi UPTD Metrologi Legal	Terseleenggaranya Sosialisasi UPTD Metrologi Legal	Meningkatnya pengetahuan terhadap pengertian Metrologi Legal

Sumber: DPA-SKPD 2013

4.1 JUMLAH UTTP YANG WAJIB DITERA DI PASAR TRADISIONAL

Monitoring dan Evaluasi Tera/Tera Ulang UTTP dan BDKT. Pasar tradisional yang diawasi penggunaan UTTP nya meliputi 5 pasar yang semuanya berada di Kota Pontianak sebagai barometer perdagangan Kalimantan Barat. Kelima pasar tradisional tersebut adalah pasar Mawar, pasar Kemuning, Pasar Flamboyan, Pasar Dahlia, serta Pasar Puring. Dari target kinerja sebesar 370 alat UTTP, realisasi sebesar 597 alat. Dengan demikian realisasi pencapaian target sebesar 161,5 %. Dari segi pelaksanaan kegiatan, tidak ada permasalahan atau kendala yang berarti. Namun kegiatan tersebut akan lebih optimal jika setiap tahun ditambah jumlah pasar tradisional yang diawasi, tidak terbatas di Kota Pontianak saja. Tentunya hal tersebut harus diiringi dengan penambahan alokasi anggaran serta SDM yang memadai.

4.2 BARANG BEREDAR YANG DIAWASI

Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen. Kegiatan Pengawasan Barang beredar yang dilaksanakan Dinas Perindag Kalbar pada tahun 2013 meliputi barang-barang yang telah diberlakukan SNI nya. Perlu diketahui, berdasarkan data terakhir, terdapat 92 produk yang diberlakukan SNI wajib. Dari target 6 jenis barang yang diawasi, realisasi mencapai 7 jenis barang sehingga persentase capaian sebesar 116,7 %. Ketujuh jenis barang tersebut adalah Lampu hemat energy, Ban dalam sepeda motor, Helm, AMDK, Garam yodium, katup tabung baja LPG, serta tabung baja LPG.

Sosialisasi UPTD Metrologi Legal. Kegiatan dilakukan di Kota Pontianak dengan mengundang Pemerintah Kabupaten/kota se Kalbar. Kegiatan ini menindak lanjuti rakor Standardisasi dan perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan. Sosialisasi ini juga dilaksanakan untuk menginisiasi urgensi metrologi legal serta memotivasi kabupaten/kota untuk membentuk UPTD Kemetrolgian.

PERMASALAHAN

Keberhasilan kinerja diatas sebenarnya dapat lebih ditingkatkan jika tersedianya di seluruh Kabupaten/kota se-kalbar SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan terbentuk lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang kewenangannya ada pada Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2012 baru terdapat tiga kota yang telah diteloh dikeluarkan keputusan dibentuknya BPSK yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang. Di bidang Kemetrolgian, saat ini di Kalbar baru ada dua UPT kemetrolgian yang beroperasi yang merupakan instansi milik Pemprov Kalbar yang harus melayani 14 kab/kota.

SOLUSI

Penambahan SDM untuk PPBJ, PPNS-PK, PPNS TDP, untuk tahun 2013 diperlukan upaya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan bijaksana, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan jasa. Saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga sedang memfasilitasi Kabupaten Lain untuk didirikan

BPSK, sebagai informasi keberadaan BPSK akan merangsang konsumen untuk lebih cermat dan pintar atas hak yang seharusnya diterima ketika telah diperoleh barang dan sehabis transaksi berlangsung dengan pemasar dan produsen. Sebagai contoh keberadaan BPSK Singkawang yang aktif telah mampu menangani 31 kasus aduan pada tahun 2012. Di bidang kemetrolgian, Keberadaan UPTD Kemetrolgian mutlak diperlukan di setiap kabupaten/kota menanggapi semakin dinamisnya sektor perdagangan ditambah lagi dengan akan berlakunya AEC.

5 Peningkatan ekspor daerah dan pengendalian impor

Indikator kinerja beserta target terhadap sasaran strategis 5 (SS 5) adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
5	Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor	5.1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kalimantan Barat	12 %	3,83 %

Sementara Indikator kinerja serta target tahun 2013 Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan perkapita di atas rata-rata	Jumlah ekspor (devisa) USD juta	1.583,86 (12%)	1.350,69 (3,83%)
		Neraca Ekspor-Impor (USDjuta)	852,88 (12%)	852,57 (11,96%)

Dalam rangka mencapai sasaran strategis 5 (SS 5) Dinas Perindag Kalbar melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan Daya Saing Ekspor dengan kegiatan seperti pada tabel di bawah:

TABEL 17 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
1	Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor (PPE) di Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Jumlah Produk Ekspor Kalbar yang dipasarkan keluar negeri	Meningkatnya nilai ekspor Kalbar
2	Partisipasi Padan Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	Meningkatnya Jumlah Produk Ekspor Kalbar yang dipasarkan keluar negeri	Meningkatnya nilai ekspor Kalbar
3	Peningkatan Informasi Ekspor	Informasi Nilai Perdagangan luar negeri (Ekspor – Impor)	

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
4	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	Peningkatan wawasan masyarakat perbatasan tentang perdagangan Lintas Batas	Perdagangan Lintas Batas dapat meningkat dan tertib
6	Sosialisasi E-SKA	Peningkatan jumlah Perusahaan yang melaksanakan e-SKA	Kemudahan dan kecepatan prosedur ekspor
7	Pemutakhiran Data Importir	Informasi jumlah importir melalui API-U dan API-P di Kalbar	
8	Forum Sinergitas Perdagangan Luar Negeri Produk Hasil Pertambangan	Rekomendasi mengenai ekspor hasil tambang sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan ekspor	Peningkatann kinerja Perdagangan Luar Negeri

Sumber: DPA-SKPD 2013

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional terdiri dari beberapa kegiatan berikut :

TABEL 18 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
1	Forum Kerja Teknis Ekonomi Sosek Malindo	Peningkatan Kerjasama regional tim ekonomi Kalbar dengan tim Malaysia	Peningkatan ekonomi sub regional
2	Partisipasi Kerjasama Sub Regional BIM EAGA	Peningkatan kerjasama ekonomi Kalbar dengan Negara ASEAN lainnya	Meningkatnya ekonomi Kalbar
3	Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA)	Peningkatan partisipasi pembahasan revisi BTA Tahun 1970 dengan pihak Malaysia	Penurunan jumlah barang ilegal

Sumber: DPA-SKPD 2013

5.1 PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR KALIMANTAN BARAT

Nilai ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar USD 1.350,69 juta atau naik sebesar 3,83 % dibandingkan pada tahun 2012 yang berjumlah USD 1.300,86 juta. Dari target yang ditetapkan sebesar USD 1.583,86 juta atau pertumbuhan sebesar 12 %, persentase capaian target indikator kinerja sebesar 31,92 %.

Sementara itu, terhadap Indikator kinerja Provinsi “**Nilai Neraca Perdagangan (ekspor-impor) Kalbar**”, dari target kinerja sebesar USD 852,88 juta atau sekitar 12 % terhadap nilai tahun 2012, pencapaian di tahun 2013 sebesar USD 852,57 juta atau sebesar 11,96 %. Sehingga dengan demikian persentase pencapaian target indikator kinerja sebesar hampir 100 %.

Ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2013 didominasi oleh tiga golongan barang seperti terlihat pada tabel di bawah.

TABEL 19 GOLONGAN BARANG PENYUMBANG EKSPOR TERBESAR KALBAR 2013

no	Gol Barang (HS)	Ekspor 2012 USD Juta	Ekspor 2013 USD Juta	pertumbuhan (%)	komposisi ekspor 2013 (%)
1	Bijih, kerak dan Abu logam	377,03	537,69	42,61	41,73
2	Karet dan barang dari karet	667,77	568,38	-14,88	39,49
3	Kayu, barang dari kayu	199,57	178,29	13,23	13,58

Sumber : BPS Kalbar 2014

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketiga golongan barang tersebut sangat mendominasi dengan menyumbang sebesar 97,69 % dari total nilai ekspor Kalbar tahun 2013. Menariknya, terjadi peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan pada golongan barang Bijih, kerak dan Abu logam yaitu sebesar 42,61 %.

Sementara itu, nilai impor Kalimantan Barat tahun 2013 berjumlah USD 498,12 juta. Angka tersebut cukup menggembirakan mengingat pada tahun 2012, nilai impor Kalbar mencapai USD 539,36 juta. Sehingga dengan demikian pada tahun 2013 terjadi penurunan nilai impor terhadap nilai tahun 2012 sebesar 7,65 %.

Golongan barang penyumbang impor terbesar bagi Kalbar adalah seperti terlihat dalam tabel berikut.

TABEL 20 GOLONGAN BARANG PENYUMBANG IMPOR TERBESAR KALBAR 2013

no	Gol Barang (HS)	Impor 2012 USD Juta	Impor 2013 USD Juta	pertumbuhan (%)	komposisi Impor 2013 (%)
1	Bahan bakar mineral	191,49	273,94	43,06	41,90
2	Bangunan terapung	81,50	56,56	-30,60	21,92
3	Mesin-mesin/pesawat mekanik	159,64	76,15	-52,30	15,53

Sumber : BPS Kalbar 2014

Kebutuhan akan bahan bakar mineral yang semakin tinggi setiap tahun tergambar dalam tabel di atas. Impor bahan bakar mineral pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 43,06 %. Untungnya, kenaikan impor golongan barang tersebut, dibarengi dengan turunnya nilai impor secara drastis dua golongan barang utama lainnya yaitu bangunan terapung dan mesin-mesin/pesawat mekanik masing-masing sebesar 30,60 % dan 52,30 % secara berurutan.

PERMASALAHAN

Walaupun pada tahun 2013 terjadi kenaikan pertumbuhan ekspor, namun masih jauh dari target yang ditetapkan. Kenaikan ekspor bijih, kerak dan bau logam sebesar 42,61 % belum dapat membawa kepada pencapaian target. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih terus turunnya nilai ekspor karet dan barang dari karet.

Perlu diketahui bahwa sejak bulan Januari 2012, komoditi karet mengalami penurunan harga yang sangat drastis dari rata-rata US\$ 576 pada bulan Februari 2011 menjadi US\$ 289 per ton pada bulan Juli 2012 (sumber BAPPEPTI, 2013) sebagai akibat belum pulihnya Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat dari resesi yang berdampak pula kepada China. Sejak bulan Oktober 2012 hingga 31 maret 2013, Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat untuk

melaksanakan kebijakan memangkas volume ekspor karet untuk mengurangi suplai karet ke pasar dunia dengan harapan dapat meningkatkan harga karet.

SOLUSI

Untuk jangka pendek hingga menengah, Pemerintah Daerah akan berupaya agar potensi CPO Kalbar sekitar 1 juta ton per tahun dapat diekspor melalui Kalimantan Barat. Diharapkan ekspor CPO langsung tersebut dapat mengamankan neraca perdagangan dan menjadi tambahan pendapatan daerah melalui bagian dari bea keluar CPO.

Dinas Perindag Kalbar sebagai institusi yang menjadi leading sektor dalam penanganan perdagangan terutama di bidang ekspor-impor Kalbar telah melakukan upaya untuk peningkatan ekspor serta pengendalian impor Kalbar dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan Daya Saing Ekspor dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor (PPE) di Dalam dan Luar Negeri.** Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan aneka produk unggulan Kalimantan Barat serta memperluas jaringan pemasaran terutama pasar luar negeri. Kegiatan pameran yang diikuti di tahun 2013 adalah Pameran Gebyar Pasar Produk Daerah (GPPD Expo 2103) yang berlangsung di Surabaya serta Pameran Trade Expo Indonesia (TEI 2013) yang dilaksanakan di Jakarta. Pameran ini berskala internasional dan diikuti juga oleh peserta dari luar negeri.
2. **Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED).** Hampir sama dengan kegiatan pameran pada item 1, hanya saja skala kegiatannya lebih bersifat nasional dengan keterlibatan peserta berasal dari dalam negeri. Dinas Perindag Kalbar turut berpartisipasi pada pameran PPED yang dilaksanakan di Jogjakarta dengan mempromosikan hasil kerajinan serta bahan tambang.
3. **Peningkatan Informasi Ekspor.** Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan data dan informasi Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat. Diharapkan, ketersediaan data yang ada dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait perdagangan luar negeri Kalbar.

PERMASALAHAN

Namun demikian, kegiatan ini terkendala kepada terbatasnya akses ke sumber data, sehingga selama ini data perdagangan luar negeri tergantung pada data resmi yang dipublikasikan oleh BPS.

4. **Pembinaan Perdagangan Lintas Batas.** Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pendekatan pembangunan perbatasan dari sisi kesejahteraan (ekonomi). Kegiatan dilakukan di 3 kabupaten yang berbatasan dengan negara Malaysia yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu dengan melibatkan pelaku usaha perdagangan lintas batas serta Pemda kabupaten setempat. Pembinaan meliputi sosialisasi kebijakan khususnya kebijakan perdagangan lintas batas.

5. **Sosialisasi E-SKA.** Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Pontianak dengan mengundang para pelaku usaha ekspor, petugas penerbitan dokumen SKA on-line, serta Asosiasi. Sosialisasi ini sangat bermanfaat terutama bagi peserta yang berasal dari kabupaten serta perbatasan sebagai pembekalan dalam melakukan registrasi on-line.
6. **Pemutakhiran Data Importir.** Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sanggau. Kegiatan dimaksudkan untuk upgrading data importir yang bertempat di 3 wilayah tersebut serta sebagai sosialisasi langsung kepada para importir pemula.

PERMASALAHAN

Adanya pemilik API yang belum meregistrasikan ke Kantor Bea Cukai sehingga belum mendapat Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan belum dapat melakukan impor.

SOLUSI

Intensitas sosialisasi perlu terus ditingkatkan agar para importir benar-benar paham hak dan kewajiban mereka.

7. **Forum Sinergitas Perdagangan Luar Negeri Produk Hasil Pertambangan.** Kegiatan dilaksanakan di Kota Pontianak dengan melibatkan stakeholder terkait yaitu Kementerian ESDM dan Dinas Pertambangan Kalbar. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan langkah-langkah dalam upaya peningkatan ekspor pertambangan serta evaluasi kendala dan hambatan yang ada serta untuk mengantisipasi stagnansi ekspor tambang Kalbar.

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

1. **Forum Kerja Sama Teknis Sosek malindo.** Kegiatan dilaksanakan di Kuching negara bagian Sarawak Malaysia. Dinas Perindag Kalbar merupakan bagian dalam tim ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa kesepakatan antara Pemprov Kalbar dan Negara bagian Sarawak terkait industri dan perdagangan antara lain rencana pembentukan Sosek Malindo Business Council (SMBC) Kalimantan Barat, serta terkait usulan ekspor CPO dan Impor barang modal melalui pos lintas batas Badau-Lubok Antu, Kalbar diminta untuk melaporkan perkembangan pembangunan terminal di PPLB Badau.
2. **Partisipasi Kerjasama Sub Regional BIMP EAGA.** Kegiatan dilaksanakan di Kota Pontianak melibatkan Kementerian Perdagangan, Bappeda kalbar, KADIN Kalbar, Akademisi, Pelaku usaha, instansi pemerintah terkait serta mahasiswa. Kegiatan berupa rapat koordinasi dalam menindak lanjuti serta mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan tingkat Menteri negara-negara BIMP EAGA yang dilaksanakan di Kota Manado Sulawesi Utara.

PERMASALAHAN

Secara Kelembagaan, Kalimantan Barat belum siap mengantisipasi hasil-hasil kesepakatan pertemuan tingkat tinggi maupun tingkat menteri BIMP EAGA yang ditandai dengan vakumnya sekretariat BIMP EAGA Kalbar.

SOLUSI

Koordinasi antara instansi terkait di lingkungan Pemprov Kalbar untuk membahas status sekretariat BIMP EAGA Kalbar mutlak diperlukan.

3. **Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA).** Kegiatan dilaksanakan di Kota Pontianak dalam bentuk rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Bappeda kalbar, serta BP2DT Kalbar. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan serta rekomendasi untuk peninjauan poin-poin perjanjian BTA 70 yang dirasakan sudah tidak relevan dengan situasi dan perkembangan di wilayah perbatasan.

PERMASALAHAN

Kewenangan perjanjian BTA 70 mutlak berada di bawah Pemerintah Pusat. Segala hal terkait isu dan masa depan BTA 70 tergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah pusat.

SOLUSI

Diperlukan usaha-usaha untuk meyakinkan pemerintah pusat untuk melakukan pengkajian BTA 70, seperti koordinasi dan konsultasi yang intensif serta kajian-kajian yang komprehensif.

Program Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN) dengan output kegiatan laporan monev kebijakan perdagangan luar negeri (kinerja ekspor-impor daerah dan perdagangan di perbatasan), koordinasi dan implementasi kebijakan perdagangan luar negeri, peningkatan SDM di bidang ekspor dan impor termasuk pemahaman atas kebijakan perdagangan luar negeri, diseminasi dan pelayanan SKA on line dan API online, Peningkatan SDM fungsional mutu barang, fasilitasi promosi ekspor dan peningkatan kemampuan Ekspor bagi UKM daerah dan penyediaan buku potensi ekspor Kalbar.

6 Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha

Pencapaian Sasaran strategis 6 (SS 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar di dukung oleh kinerja UPT di lingkungan Dinas yaitu Unit Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB), Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak, dan Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang.

Indikator kinerja serta target terhadap sasaran strategis 6 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
6	Peningkatan kualitas pelayanan	6.1 Akreditasi Laboratorium Pengujian	2 lab 9 komoditi	2 lab 9 komoditi
		6.2 Jumlah komoditi ekspor dan produk wajib SNI yang dimonitor	7 jenis	7 jenis

	6.3 Jumlah alat UTTP yang ditera atau tera ulang	27.813 unit	23.811 unit
--	--	-------------	-------------

Dalam mencapai sasaran strategis 6, UPT tersebut melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

TABEL 21 PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
UPSMB			
1	Monitoring Mutu Komoditi Unggulan Kalbar	Terlaksananya monitoring mutu komoditi tengkawang, karet/bokar, lada dan CPO di Kab/kota	Data mutu komoditi
2	Kaji Ulang Manajemen ISO/BC 17025, 2008	Terlaksananya kaji ulang system manajemen ISO 17025:2008	Akreditasi Lab terjaga
3	Penyempurnaan Dokumen Mutu Laboratorium	Dokumen mutu laboratorium	Akreditasi dan manajemen mutu lab terjaga
4	Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian	Tersedianya bahan kimia untuk pengujian	Pengadaan bahan kimia untuk pengujian
5	Kalibrasi Peralatan Standar	Terlaksananya kalibrasi peralatan standar	Peralatan standar yang telah terakreditasi
6	Re Akreditasi Laboratorium	Terlaksananya sistem manajemen ISO 17025:2005	Akreditasi Lab terjaga
7	Uji Profisiensi laboratorium	Penambahan lingkup akrediasasi pengujian	Akreditasi lab terjaga
8	Surveilen Laboratorium	Terlaksananya surveilen lab	Terjaganya akreditasi laboratorium
9	Pelatihan Teknis Internal untuk Pengujian dan Kalibrasi	Peningkatan pemahaman staf	Peningkatan pemahaman staf
10	Audit Internal Laboratorium	Terlaksananya sistem manajemen mutu ISO 17025:2005	Akreditasi lab terjaga
UPT KEMETROLOGIAN Pontianak			
1	Verifikasi Alat - Alat Standar	Terlaksananya verifikasi alat-alat standar	Akurasi peralatan standar
2	Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP	Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	Peningkatan pelayanan kemetrologian
3	Surveilen	Dokumen panduan mutu dan prosedur mutu lab	Meningkatnya kemampuan lab
4	Uji Banding Kalibrasi	Terlaksananya uji banding	Peningkatan kemampuan laboratorium
5	Penyusunan Data UTTP di 11 Kabupaten / Kota	Tersedianya data UTTP setiap kab/kota	Peningkatan pelayanan keemtrologian
6	Pengelolaan Laboratorium	Pengelolaan lab sesuai panduan dan prosedur mutu	Terpeliharanya kemampuan lab sesua panduan dan prosedur mutu
UPT KEMETROLOGIAN Singkawanag			
1	Pelayanan Tera Ulang UTTP	Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	Peningkatan pelayanan kemetrologian
2	Verifikasi Alat Standar	Terlaksananya verifikasi alat-alat standar	Peningkatan pelayanan kemetrologian

Sumber: DPA-UPT 2013

6.1 AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJIAN

Pada tahun 2013, UPSMB menetapkan target indikator kinerja untuk akreditasi laboratoriumnya 2 laboratorium yang direpresenatasikan dengan dua dokumen panduan dan prosedur mutu. Ruang lingkup akreditasi sejumlah Sembilan komoditi. Target tersebut tercapai 100 %. Dua laboratorium yang dimiliki UPSMB tetap terjaga akreditasinya yaitu Laboratorium Kalibrasi dan Laboratoriun pengujian. Laboratorium pengujian memiliki 9 ruang lingkup, yaitu untuk pengujian SIR, Bokar, CPO, Minyak lemak, Palm Kernel, Garam Iodium, Lada Putih, Lada Hitam, serta plastik bandela.

6.2 JUMLAH KOMODITI EKSPOR DAN PRODUK WAJIB SNI YANG DIMONITOR

Indikator tersebut selain dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama usaha ekspor produk unggulan Kalimantan Barat seperti SIR, Karet, Bokar, Lada, CPO, juga untuk pelayanan kepada masyarakat seputar produk-produk yang wajib SNI seperti Garam dan AMDK. Kegiatan meliputi seluruh kab/kota. Hasil monitoring komoditi tersebut menjadi rekomendasi untuk kabupaten/kota. Dari target indikator sebanyak 7 komoditi realisasi sebanyak 7 komoditi sehingga pencapaian sebesar 100 %.

6.3 JUMLAH UTP YANG DITERA DAN TERA ULANG

Target indikator kinerja di atas didukung oleh program dan kegiatan di bawah UPT Kemetrolgian Pontianak dan Singkawang. Target pada tahun 2013 adalah sebesar 27.183 unit dengan perincian target UPT Kemetrolgian Pontianak sebesar 20.313 unit dan UPT Kemetrolgian Singkawang sebesar 7.500 unit. Realisasi yang dicapai pada tahun 2013 sebesar 23.811 sehingga persentasi pencapaian terhadap target terhitung sebesar 87,60 %.

Perlu diketahui bahwa lingkup wilayah kerja UPT Kemetrolgian Pontianak meliputi 11 kabupaten/kota yaitu; Kabupaten Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Landak, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Sementara itu, wilayah pelayanan UPT Kemetrolgian Singkawang meliputi 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang.

Selain pencapaian kinerja berdasarkan target indikator di atas, UPT Kemetrolgian juga berkontribusi terhadap pemasukan PAD daerah. Pada tahun 2013 pendapatan yang dihasilkan berjumlah sebesar RP. 811.574.615 seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

TABEL 22 REALISASI PENERIMAAN PAD TAHUN 2013

NO	PROGRAM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
1	KEMETROLOGIAN SINGKAWANG	68.400.000	94.977.400	138	Utk th. 2014 PAD di tingkatkan menjadi Rp. 100.000.000,-
2	KEMETROLOGIAN PONTIANAK	526.527.575	716.597.215	136	Utk th. 2014 PAD di tingkatkan menjadi Rp. 600.000.000,-
TOTAL		594.927.575	811.574.615	136	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa UPT Kemetrolgian Singkawang dengan wilayah kerja di 3 kabupaten/kota menghasilkan PAD sebesar RP. 94.977.400 sementara UPT Kemetrolgian Pontianak dengan wilayah kerja di 11 kabupaten/kota menghasilkan penerimaan sebesar RP.. 716.597.215.

PERMASALAHAN

Sebagai Laboratorium pengujian yang telah mendapatkan akreditasi KAN untuk pelaksanaan standar Mutu ISO 17025 tentunya banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah hasil pengujian Lab UPSMB yang termasuk dalam ruang lingkup telah diakui secara internasional atau sejajar dengan laboratorium internasional. Namun demikian, akreditasi tersebut harus terus dipelihara atau dipertahankan. Peningkatan kualitas laboratorium baik dari aspek peralatan maupun SDM menjadi sebuah keharusan. UPSMB yang merupakan laboratorium pelayanan yang tidak beorientasi pada keuntungan (profit oriented) menghadapi sebuah dilema ketika dihadapkan pada biaya operasional Laboratorium yang tinggi baik dalam pengadaan peralatan dan bahan-bahan kimia pengujian maupun upgrading skill SDMnya, serta dihadapkan pada kebijakan yang tidak memungkinkannya menarik retribusi atau jasa. Hal ini juga menempatkan UPSMB berada pada posisi yang semakin sulit mengingat UPSMB juga harus menghadapi persaingan terbuka dengan laboratorium-laboratorium sejenis baik yang dikelola oleh Lembaga pemerintah maupun pihak swasta.

Sementara itu, di bidang kemetrolgian legal, kondisinya sangat jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh UPSMB. Di bawah payung regulasi kemetrolgian nasional, UPT Kemetrolgian memiliki prospek kinerja yang menjanjikan seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat yang direpresentasikan dalam peningkatan perdagangan. Kendala yang dihadapi saat ini oleh UPT Kemetrolgian hanyalah permasalahan kurangnya kapasitas infrastruktur UPT serta kurangnya SDM penera terkait dengan luasnya wilayah kerja yang harus dilayani. Saat ini baru ada dua UPT Kemetrolgian di Kalbar. Oleh karena itu Pemerintah pusat sangat mendorong dan memberikan dukungan konkrit atas pembentukan UPTD-UPTD Kemetrolgian di Kabupaten/kota.

SOLUSI

Terkait dengan kondisi yang dihadapi UPSMB, perlu diadakan pengkajian terkait core-business serta orientasi program dan kegiatan untuk mencari solusi tentang masa depan UPSMB. Di awal tahun 2014, pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan rapat koordinasi dengan UPT di lingkungan pemprov Kalbar untuk pengkajian keberadaan UPT. Sebagai tambahan, pada struktur organisasi Kementerian Perdagangan RI yang terbaru, UPSMB seluruh Indonesia merupakan UPT daerah pendukung program standardisasi dan perlindungan konsumen di bawah wilayah kerja Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar pada tahun anggaran 2013 melaksanakan kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Prov. Kalbar serta APBN Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

PELAKSANAAN APBD TA 2013

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar pada 2013 mendapatkan anggaran APBD dalam bentuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.236.700.050 yang meliputi Dinas dan empat UPT di lingkungan Dinas Perindag. Sementara itu untuk belanja langsung, Dinas Perindag mendapatkan dana APBD sebesar Rp. 10.600.000.000 dan melalui perubahan anggaran sesuai dengan DPPA Dinas Perindag tahun 2013 menjadi Rp. 10,696,777,500. UPT-UPT di lingkungan Dinas Perindag mendapatkan belanja tidak langsung sendiri seperti yang tertera dalam tabel di bawah.

TABEL 23 REKAPITULASI BELANJA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDG KALBAR TA 2013

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	PERSENTASE REALISASI	
				Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		28,431,761,550	25,095,516,453	90.00	98.98
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,236,700,050	10,481,420,176	93.28	100
II.	BELANJA LANGSUNG	17,648,352,500	15,515,177,498	89.44	97.95
1.	DINAS PERINDAG	10,696,777,500	9,500,487,169	88.82	96.91
2.	UPT DILINGKUNGAN DINAS PERINDAG	6,951,575,000	6,014,690,229	86.52	99.23
	a. UPSMB PONTIANAK	1,456,915,000	1,105,015,622	90.4	99.89
	b. KEMETROLOGIAN SINGKAWANG	844,660,000	774,223,492	91.66	98.57
	c. KEMETROLOGIAN PONTIANAK	2,500,000,000	2,174,042,976	86.96	99.76
	d. UPIKM PROV. KALBAR	2,150,000,000	1,961,408,139	91.23	99.26

Seperti terlihat dalam tabel di atas, total belanja langsung Dinas Perindag Prov. Kalbar beserta UPT berjumlah sebesar Rp. 10,696,777,500 sehingga keseluruhan anggaran yang diterima dalam bentuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 28,431,761,550. Adapun rincian program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

DINAS

Rincian Program dan Kegiatan Dinas terdiri dari **Program Rutin** sejumlah 7 (tujuh) Program rutin Dinas dengan 50 (lima puluh) kegiatan yaitu 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, 6) Program pengelolaan aset daerah, dan 7) Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan Bidang Indag. Jumlah

Anggaran untuk ketujuh Program tersebut sebesar **Rp. 3.816.615.000,- atau 35,68%** dari total anggaran.

Sedangkan **Program Inti /core** dibagi dalam dua urusan yaitu **urusan perdagangan** yang terdiri dari 4 (empat) Program inti/core dengan 23 (duapuluh tiga) kegiatan yaitu 1) Program Perlindungan Konsumen, 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, 3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan, dan 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Jumlah Anggaran untuk keempat Program tersebut sebesar **Rp. 2.599.686.500,- atau 24,30%** dari total anggaran. Sementara **urusan Industri** terdiri dari 3 (tiga) program dengan 22 (duapuluh dua) kegiatan yaitu (1) Bidang Industri Logam Mesin elektronika dan aneka (ILMEA), (2) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dan (3) Program Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH). Jumlah Anggaran untuk ketiga Program-Program tersebut sebesar **Rp. 4.280.476.000,- atau 40,02%** dari total anggaran.

Pada program rutin, satu kegiatan di bawah program Peningkatan Pengembangan Perencanaan Indag yaitu Penyusunan Data Spasial Indag tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan setelah revisi pada anggaran perubahan 2013. Sementara itu pada program inti, satu kegiatan di bawah Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yaitu Partisipasi pada Seminar dan Pameran OVOP Internasional tidak dilaksanakan karena pelaksanaan kegiatan tersebut dibatalkan oleh negara penyelenggara akibat krisis ekonomi.

Sementara itu dukungan UPT terhadap kinerja Dinas Perindag adalah sebagai berikut:

UPSMB

Program Rutin terdiri dari enam (6) Program dengan 40 kegiatan yaitu program 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, dan 6) Program pengelolaan aset daerah. Jumlah Anggaran untuk ketujuh Program tersebut sebesar Rp. 1.223.800.500 atau 69,84 % dari total anggaran.

Program Inti/Core terdiri dari 2 (2) program dengan 12 kegiatan yaitu program 1) Peningkatan Daya saing Produk Unggulan ekspor dan 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Jumlah Anggaran untuk kedua Program tersebut sebesar Rp. 528.524.500 atau 30,16 % dari total anggaran.

UP KEMETROLOGIAN PONTIANAK

Program Rutin terdiri dari lima (5) Program dengan 35 kegiatan yaitu 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. Jumlah Anggaran untuk ketujuh Program tersebut sebesar Rp. 1.091.208.450 atau 43,65 % dari total anggaran.

Program Inti/core terdiri dari satu (1) Program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian dengan enam (6) Kegiatan. Jumlah Anggaran untuk Program tersebut sebesar Rp. 1.408.791.550 atau 56,35 %.

UP KEMETROLOGIAN SINGKAWANG

Program Rutin terdiri dari empat (4) Program dengan 27 kegiatan yaitu 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. Jumlah Anggaran untuk ketujuh Program tersebut sebesar Rp. 467.430.500 atau 65,84 % dari total anggaran.

Program Inti/core terdiri dari satu (1) Program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian dengan dua (2) Kegiatan. Jumlah Anggaran untuk Program tersebut sebesar Rp. 242.569.500 atau 34,16 % dari total anggaran.

UP IKM

Program Rutin terdiri dari enam (6) Program dengan 40 kegiatan yaitu program 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, dan 6) Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa. Jumlah Anggaran untuk ketujuh Program tersebut sebesar Rp. 700.164.600 atau 32,57 % dari total anggaran.

Program Inti/core terdiri dari satu (1) Program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dengan 22 Kegiatan. Jumlah Anggaran untuk Program tersebut sebesar Rp. 1.449.835.400 atau 67,43 % dari total anggaran.

Total anggaran program dan kegiatan inti Dinas dan UPT TA 2013 sebesar Rp. 10,356,313,450, dicapai realisasi keuangan sebesar Rp. 9,557,005,047 atau sekitar 92 % sehingga sisa anggaran berjumlah Rp. 799,308,404 atau sekitar 8 % dari total anggaran Program inti.

Sementara itu Program dan kegiatan rutin dinas dan UPT TA 2013 sebesar Rp. 7,299,223,050, dicapai realisasi keuangan sebesar Rp. 6,260,205,877 atau sekitar 85,77 % sehingga dengan demikian sisa anggaran sebesar Rp. 1,039,013,173 atau sekitar 14,23 % dari total anggaran program rutin.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

TABEL 24 REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN APBD PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS TA 2013

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
				KEUANGAN			FISIK
				Rp.	sis	%	%
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4%)	8
1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalbar						
	PROGRAM INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH)	2,639,632,250	2,719,102,250	2,640,443,447.00	78,658,803.00	97.11	100.00
	Partisipasi Pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi dan Promosi Produk Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan pada Bulan Bhakti	155,009,300.00	155,009,300.00	153,635,500.00	1,373,800.00	99.11	100.00
	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri	503,704,500.00	583,174,500.00	569,004,650.00	14,169,850.00	97.57	100.00
	Dukungan Pengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah	224,202,450.00	224,202,450.00	213,560,547.00	10,641,903.00	95.25	100.00
	Penumbuhan Industri Pengolahan Hasil Laut	282,903,500.00	282,903,500.00	278,128,700.00	4,774,800.00	98.31	100.00
	Implementasi Rencana aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Industri	346,026,500.00	346,026,500.00	342,321,700.00	3,704,800.00	98.93	100.00
	Penguatan Teknologi Pengolahan Karet	268,008,550.00	268,008,550.00	264,328,800.00	3,679,750.00	98.63	100.00
	Pengkajian Kompetensi Inti Industri Daerah (KID)	499,897,950.00	499,897,950.00	493,765,150.00	6,132,800.00	98.77	100.00
	Bimbingan Teknis Industri Pengolahan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret)	159,993,400.00	159,993,400.00	126,218,400.00	33,775,000.00	78.89	100.00
	Bantuan Peralatan Industri Pengolahan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret)	199,886,100.00	199,886,100.00	199,480,000.00	406,100.00	99.80	100.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA	589,222,700	589,222,700	569,275,371.00	19,947,329.00	96.61	100.00
	Dukungan Pengembangan Alsintan Centre	251,615,600.00	251,615,600.00	250,603,600.00	1,012,000.00	99.60	100.00
	Pengembangan Industri Kreatif Basis IT	128,281,500.00	128,281,500.00	128,204,600.00	76,900.00	99.94	100.00
	Ratek Bidang ILMEA SE Kalbar dan Partisipasi Pada Rakor ILMEA Tingkat Nasional	129,172,600.00	129,172,600.00	111,999,171.00	17,173,429.00	86.71	100.00
Pengembangan Industri Galangan Kapal	80,153,000.00	80,153,000.00	78,468,000.00	1,685,000.00	97.90	100.00	

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
				KEUANGAN			FISIK
				Rp.	sis	%	%
2 Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	2,421,986,450	2,421,986,450	2,113,776,881.00	308,209,569.00	87.27	94.82
	(program di bawah Bidang ILMEA)	972,151,050	972,151,050	820,080,200.00	152,070,850.00	84.36	89.64
	Partisipasi Pameran Nasional, Festifal Maulid dan Daerah	199,799,000.00	199,799,000.00	163,613,800.00	36,185,200.00	81.89	100.00
	Partisipasi Pameran Produk Unggulan INACRAFT 2013	109,555,250.00	109,555,250.00	109,291,700.00	263,550.00	99.76	100.00
	Partisipasi Seminar dan Pameran Produk OVOP Internasional	100,700,000.00	100,700,000.00	-	100,700,000.00	0.00	0.00
	Partisipasi Pameran Aneka Produk Kerajinan Kalbar Pada HUT Gelar Kerajinan Dekranasda dan Taman Mini di Jakarta	97,653,000.00	97,653,000.00	92,329,600.00	5,323,400.00	94.55	100.00
	Dukungan Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Provinsi (Keramik Hias dan Halal, Merek, Paten dan SP-IRT)	113,514,600.00	113,514,600.00	113,494,500.00	20,100.00	99.98	100.00
	Pendampingan dan Evaluasi Unit Usaha Baru di Desa Model pada 5 Kab/Kota (Kerjasama dengan PKK)	70,461,000.00	70,461,000.00	70,211,000.00	250,000.00	99.65	100.00
	Teknologi Pengolahan Mangrove Terpadu di Kab. Pontianak dan Magang di Surabaya	123,618,000.00	123,618,000.00	117,547,600.00	6,070,400.00	95.09	100.00
	Dukungan Konvensi GKM-IKM Tingkat Provinsi dan Nasional	48,429,600.00	48,429,600.00	48,385,000.00	44,600.00	99.91	100.00
	Pengembangan IKM Daerah Perbatasan	108,420,600.00	108,420,600.00	105,207,000.00	3,213,600.00	97.04	100.00
	(program di bawah UPT UP-IKM)	1,449,835,400.00	1,449,835,400.00	1,293,696,681.00	156,138,719.00	89.23	100.00
	Partisipasi Pada Kegiatan Rakor Penyusunan Program Pembinaan IKM Tingkat Nasional/Regional	27,250,000	27,250,000	21,441,250.00	5,808,750.00	78.68	100.00
	Rekrutmen Peserta Pelatihan CEFE	9,000,000	9,000,000	9,000,000.00	0.00	100.00	100.00
	Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE	130,000,000	130,000,000	129,840,000.00	160,000.00	99.88	100.00
	Pelayanan Klinik Desain Merk, Kemasan dan Haki	45,700,000	45,700,000	44,021,200.00	1,678,800.00	96.33	100.00
	Bimbingan Teknis Penerapan GOOD Manufacturing Practice (GMP)Bagi IKM pangan	50,000,000	50,000,000	50,000,000.00	0.00	100.00	100.00
	Pendampingan IKM Pasca Pelatihan Pangan dan Kerajinan	15,000,000	15,000,000	13,675,000.00	1,325,000.00	91.17	100.00
	Tes Market (Uji Pasar) Produk IKM Pasca Pelatihan	39,138,000	39,138,000	32,395,100.00	6,742,900.00	82.77	100.00
	Evaluasi Pembinaan Desa Model Untuk Daerah Pesisir Pedalaman, Perbatasan dan Perkotaan Kerjasama dengan PKK Prov. Kalbar	26,300,000	26,300,000	25,100,000.00	1,200,000.00	95.44	100.00
Widyaloka ke Terminal Kemasan IKM Pangan dan UPT Kerajinan	70,021,400	70,021,400	66,809,900.00	3,211,500.00	95.41	100.00	

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI				
				KEUANGAN			FISIK	
				Rp.	sis	%	%	
3	Perjajin IKM Kerjasama Dengan PKK Prov. Kalbar	21,400,000	21,400,000	21,400,000.00	0.00	100.00	100.00	
	Pelatihan Teknis Pengembangan Anyaman Rajut dan Bordir Bagi Perajin IKM Kerjasama Dengan PKK Prov. Kalbar	49,300,000	49,300,000	46,898,000.00	2,402,000.00	95.13	100.00	
	Study Teknologi Pengembangan IKM Berbasis Kelapa Sawit	32,174,000	32,174,000	28,992,880.00	3,181,120.00	90.11	100.00	
	Pelatihan Teknis Pembuatan Alat Angkut Pertanian/Perkebunan Bermesin Roda Empat	144,800,000	144,800,000	144,270,000.00	530,000.00	99.63	100.00	
	Pelatihan Teknis Aneka Produk Anyaman Daun dan Pelepah Kelapa Sawit	73,800,000	73,800,000	72,885,000.00	915,000.00	98.76	100.00	
	Pelatihan Teknis Diversifikasi Produk Kerajinan Rotan/ Bambu Kerjasama dengan dekranasda Prov. Kalbar	79,000,000	79,000,000	76,158,700.00	2,841,300.00	96.40	100.00	
	Pengiriman Peserta Diklat Tekhnis/Magang Pengembangan Produk dan Desain Kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar	8,120,000	8,120,000	8,120,000.00	0.00	100.00	100.00	
	Pelatihan Tekhnis Pembuatan Tenun Ikat Motif Khas Kalbar Kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar	64,090,000	64,090,000	64,070,000.00	20,000.00	99.97	100.00	
	Bimbingan dan Penyuluhan ke Sentra Kerajinan di Kab/Kota Kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar	45,830,000	45,830,000	45,131,900.00	698,100.00	98.48	100.00	
	Evaluasi dan Monitoring Griya Kerajinan Kalbar di Jakarta Kerjasama Dengan Dekranasda Prov.Kalbar	29,310,000	29,310,000	21,033,000.00	8,277,000.00	71.76	100.00	
	Partisipasi Pada pameran Daerah ,Nasional dan Luar Negeri	253,810,000	261,310,000	149,876,000.00	111,434,000.00	57.36	100.00	
	Pengmbangan Aneka Kerajinan Khas Kalbar	64,550,000	64,550,000	63,525,000.00	1,025,000.00	98.41	100.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Griya Kerajinan prov. Kalbar	171,242,000	163,742,000	159,053,751.00	4,688,249.00	97.14	100.00	
	Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	988,434,250	988,434,250	921,250,725.00	67,183,525.00	93.20	100.00
		Fasilitasi Pengolahan Entry data SIUP dan TDP	43,871,000.00	43,871,000.00	42,769,500.00	1,101,500.00	97.49	100.00
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kab/Kota	49,380,500.00	49,380,500.00	41,288,075.00	8,092,425.00	83.61	100.00	
	Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan Pemasaran Produk Kerajinan Kalbar	54,465,300.00	54,465,300.00	50,536,300.00	3,929,000.00	92.79	100.00	
	Partisipasi Pada Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ)	143,632,250.00	143,632,250.00	134,158,600.00	9,473,650.00	93.40	100.00	
	Penyelenggaraan Pasar Murah	363,860,750.00	363,860,750.00	349,395,700.00	14,465,050.00	96.02	100.00	

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
				KEUANGAN			FISIK
				Rp.	sis	%	%
4	Monitoring Stock Perdagangan Antar Pulau	58,253,150.00	58,253,150.00	58,205,850.00	47,300.00	99.92	100.00
	Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan	41,344,050.00	41,344,050.00	39,117,600.00	2,226,450.00	94.61	100.00
	Partisipasi Pada Pameran Pangan Nusa	113,830,750.00	113,830,750.00	99,650,600.00	14,180,150.00	87.54	100.00
	Partisipasi Pada Pertasi Kencana, Lingkungan Hidup dan Pangan Sedunia	63,121,500.00	63,121,500.00	49,453,500.00	13,668,000.00	78.35	100.00
	Monitoring Perdagangan Gula	56,675,000.00	56,675,000.00	56,675,000.00	0,00	100.00	100.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN	312,067,250	312,067,250	268,664,422.50	43,402,827.50	86.09	100.00
	Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen	97,902,500.00	97,902,500.00	82,404,250.00	15,498,250.00	84.17	100.00
	Monitoring dan Evaluasi Tera/Tera Ulang dan BDKT	144,236,500.00	144,236,500.00	132,670,172.50	11,566,327.50	91.98	100.00
	Sosialisasi UPTD Metrologi Legal	69,928,250.00	69,928,250.00	53,590,000.00	16,338,250.00	76.64	100.00
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN	956,628,750	956,628,750	908,202,650.00	48,426,100.00	94.94	100.00
	Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor (PPE) di Dalam dan Luar Negeri	349,425,500.00	349,425,500.00	320,336,750.00	29,088,750.00	91.68	100.00
	Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	280,438,500.00	280,438,500.00	275,086,600.00	5,351,900.00	98.09	100.00
	Peningkatan Informasi Ekspor	92,928,000.00	92,928,000.00	86,800,600.00	6,127,400.00	93.41	100.00
	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	91,608,000.00	91,608,000.00	88,908,000.00	2,700,000.00	97.05	100.00
	Sosialisasi E-SKA	46,574,750.00	46,574,750.00	42,810,700.00	3,764,050.00	91.92	100.00
	Pemuktahiran Data Importir	35,570,000.00	35,570,000.00	35,250,000.00	320,000.00	99.10	100.00
	Forum Sinergitas Perdagangan Luar Negeri Produk Hasil Pertambangan	60,084,000.00	60,084,000.00	59,010,000.00	1,074,000.00	98.21	100.00
	kegiatan di bawah UPSMB	153,570,000.00	153,570,000.00	111,571,500.00	41,998,500.00	72.65	100.00
Monitoring Mutu Komoditi Tengawang, Karet / Bokar, Lada dan CPO ke Kab/kota	81,644,000	81,644,000	60,767,000	20,877,000.00	74.43	100.00	

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
				KEUANGAN			FISIK
				Rp.	sis	%	%
6 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat & dunia usaha	Pengambilan dan Pengujian Mutu Contoh Garam, AMDK, Pupuk dan Barang Beredar lainnya / SNI wajib di pasar pada kab/kota	71,926,000	71,926,000	50,804,500	21,121,500.00	70.63	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	342,556,250	342,556,250	294,752,450.00	47,803,800.00	86.04	100.00
	Forum Kerja Teknis Ekonomi Sosek Malindo	118,260,500.00	118,260,500.00	87,051,500.00	31,209,000.00	73.61	100.00
	Partisipasi Kerjasama Sub Regional BIM EAGA	76,272,500.00	76,272,500.00	73,272,500.00	3,000,000.00	96.07	100.00
	Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA)	148,023,250.00	148,023,250.00	134,428,450.00	13,594,800.00	90.82	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN	2,026,315,550.00	2,026,315,550.00	1,840,639,100.00	185,676,450.00	90.84	100.00
	UPT KEMETROLOGIAN PONTIANAK	1,408,791,550	1,408,791,550	1,290,464,900.00	118,326,650.00	91.60	100.00
	Verifikasi Alat - Alat Standar	53,407,900	53,407,900	28,156,300	25,251,600.00	52.72	100.00
	Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP	1,200,809,250	1,200,809,250	1,165,843,700	34,965,550.00	97.09	100.00
	Survelen	56,613,000	56,613,000	16,714,800	39,898,200.00	29.52	100.00
	Uji Banding Kalibrasi	38,688,900	38,688,900	25,415,100	13,273,800.00	65.69	100.00
	Penyusunan Data UTTP di 11 Kabupaten / Kota	4,556,250	4,556,250	4,118,750	437,500.00	90.40	100.00
	Pengelolaan Laboratorium	54,716,250	54,716,250	50,216,250	4,500,000.00	91.78	100.00
	UPT KEMETROLOGIAN SINGKAWANG	242,569,500.00	242,569,500.00	231,711,100.00	10,858,400.00	95.52	100.00
	Pelayanan Tera Ulang UTTP	225,483,500	225,483,500	216,021,500	9,462,000.00	95.80	100.00
	Verifikasi Alat Standar	17,086,000	17,086,000	15,689,600	1,396,400.00	91.83	100.00
UPSMB	374,954,500.00	374,954,500.00	318,463,100.00	56,491,400.00	84.93	100.00	
Monitoring Mutu Komoditi Unggulan Kalbar	40,339,000	40,339,000	5,980,000	34,359,000.00	14.82	100.00	
Kaji Ulang Manajemen ISO/BC 17025, 2008	12,313,500	12,313,500	12,253,500	60,000.00	99.51	100.00	

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
				KEUANGAN			FISIK
				Rp.	sis	%	%
	Penyempurnaan Dokumen Mutu Laboratorium	11,601,000	11,601,000	11,601,000	0.00	100.00	100.00
	Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian	70,650,000	70,650,000	70,327,000	323,000.00	99.54	100.00
	Kalibrasi Peralatan Standar	19,854,000	19,854,000	19,502,100	351,900.00	98.23	100.00
	Re Akreditasi Laboratorium	42,007,000	42,007,000	40,281,700	1,725,300.00	95.89	100.00
	Uji Profisiensi laboratorium	15,858,000	15,858,000	14,158,000	1,700,000.00	89.28	100.00
	Surveilen Laboratorium	62,968,000	62,968,000	45,502,000	17,466,000.00	72.26	100.00
	Pelatihan Teknis Internal untuk Pengujian dan Kalibrasi	89,735,000	89,735,000	89,228,800	506,200.00	99.44	100.00
	Audit Internal Laboratorium	9,629,000	9,629,000	9,629,000	0.00	100.00	100.00

TABEL 25 REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN TA 2013

UNIT KERJA	NAMA PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN Rp.	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			
				KEUANGAN			fisik
				Rp.	Sisa	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS	TOTAL	3,799,307,500	3,816,615,000	3,077,818,003	738,796,997	87.60	93.98
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,270,134,000	1,270,134,000	1,059,726,392	210,407,608	83.43	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	801,600,000	818,907,500	725,074,312	93,833,188	88.54	100
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	49,450,000	49,450,000	49,437,500	12,500	99.97	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	445,124,000	445,124,000	403,735,279	41,388,721	90.70	67.96
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	284,828,000	284,828,000	278,607,400	6,220,600	97.82	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	83,757,000	83,757,000	81,407,700	2,349,300	97.20	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN INDAG	864,414,500	864,414,500	479,829,420	384,585,080	55.51	89.92
UPSMB	TOTAL	1,171,475,500	1,223,800,500	1,189,678,574	34,121,926	98.64	99.95
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	452,572,500	478,875,000	453,667,549	25,207,451	94.74	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	560,844,000	574,244,000	567,308,325	6,935,675	98.79	99.69
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8,050,000	8,050,000	8,050,000	0	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	105,540,500	118,163,000	116,184,200	1,978,800	98.33	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37,093,500	37,093,500	37,093,500	0	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	7,375,000	7,375,000	7,375,000	0	100	100
UP KEMETROLOGIAN PNK	TOTAL	1,091,208,450	1,091,212,450	883,578,076	207,630,374	73.67	99.60
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	595,475,900	595,475,900	517,117,505	78,358,395	86.84	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	306,729,500	306,729,500	263,301,071	43,428,429	85.84	98.04
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	29,900,000	29,900,000	29,269,000	631,000	97.89	100

UNIT KERJA	NAMA PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN Rp.	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			
				KEUANGAN			fisik
				Rp.	Sisa	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	99,915,500	99,919,500	39,261,500	60,654,000	39.29	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	59,187,550	59,187,550	34,629,000	24,558,550	58.51	100
	TOTAL	470,430,500	467,430,500	441,419,766	26,010,734	97.42	99.25
UP KEMETROLOGIAN SNK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	336,618,000	333,618,000	309,240,566	24,377,434	92.69	97.00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	43,510,000	43,510,000	43,505,000	5,000	99.99	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	57,500,000	57,500,000	56,008,700	1,491,300	97.41	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32,802,500	32,802,500	32,665,500	137,000	99.58	100
	TOTAL	700,164,600	700,164,600	667,711,458	32,453,142	95.93	99.81
UP IKM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	412,477,100	412,477,100	392,706,888	19,770,212	95.21	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	171,992,500	171,992,500	160,935,570	11,056,930	93.57	98.84
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7,200,000	7,200,000	6,400,000	800,000	88.89	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	63,750,000	63,750,000	63,189,000	561,000	99.12	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30,800,000	30,800,000	30,620,000	180,000	99.42	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	13,945,000	13,945,000	13,860,000	85,000	99.39	100
	TOTAL	700,164,600	700,164,600	667,711,458	32,453,142	95.93	99.81

PELAKSANAAN APBN TA 2013

APBN dekonsentrasi pada Dinas Perindag Provinsi Kalbar sebesar Rp. 5.061.929.000, berasal dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Program Kementerian Perdagangan terdiri dari Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, dengan anggaran sebesar Rp. 1.077.944.000 serta Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan anggaran sejumlah Rp. 1.130.985.000. Sementara itu Anggaran dari Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.853.000.000, digunakan untuk melaksanakan Program revitalisasi dan Penumbuhan IKM.

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2013 APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. **4.581.491.049** atau sebesar 92,29%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,37%. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.077.944.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 973.295.858,- atau 90,29%, sedangkan realisasi fisik sebesar 97,06% dimana 1 (satu) kegiatan pemetaan potensi ekspor tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya juklak kegiatan dari Kementerian Perdagangan hingga akhir tahun anggaran. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu anggaran Rp. 1.130.985.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.005.602.807,- atau 88,91% dan realisasi fisik 100%. Sementara itu Program revitalisasi dan Penumbuhan IKM dengan pagu anggaran Rp. 2.853.000.000,- realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 2.693.000.000,- atau 94,39% dan realisasi fisik 100%.

TABEL 26 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBN TA 2013

No	Program	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi Anggaran Rp	Persentase Realisasi	
				keu	Fisik
Total APBN Perdagangan & Perindustrian		5.061.929.000	4.581.491.049	92,29%	99,37%
I.	APBN Perdagangan	2.208.929.000	1.995.516.049	89,59%	98,56%
1	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	1.077.944.000	989.913.242	90,29%	97,06%
2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.130.985.000	1.005.602.807	88,91%	100,00%
II.	APBN Perindustrian	2.853.000.000	2.585.975.000	94,39%	100,00%
3	Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	2.853.000.000	2.585.975.000	94,39%	100,00%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas tahun 2008-2013 dan dipertegas oleh kontrak kinerja Kepala Dinas dan Gubernur.

LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas pada tahun anggaran 2013. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama maupun analisis kerja berdasarkan misi dan sasaran.

Hasil capaian kinerja enam sasaran strategis yang ditunjukkan oleh 15 indikator kinerja utama secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar 133 %, meskipun demikian beberapa pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program industri dan perdagangan membutuhkan koordinasi atau kerjasama yang erat dengan seluruh stakeholder terkait, baik dengan pemerintah pusat dan kab/kota, penegak hukum, instansi vertikal lainnya, akademisi, pengusaha, maupun masyarakat. Secara rinci, pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Tumbuh dan Berkembang Sektor Industri Kalbar dengan rerata tingkat pencapaian sasaran sebesar 166,30 % yang terbagi menjadi 4 Indikator Kinerja Utama.
2. Pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Tumbuh Dan Berkembangnya Industri Kecil Dan Menengah dengan rerata tingkat pencapaian sasaran sebesar 29,79% yang terbagi menjadi 4 Indikator Kinerja Utama.
3. Pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu Peningkatan Efisiensi Distribusi Perdagangan Dalam Negeri dengan satu Indikator Kinerja Utama yaitu Laju Inflasi Kalbar dengan target sebesar 4,47% dan realisasi sebesar 9,4 % dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 57,70%.
4. Pencapaian sasaran strategis keempat yaitu Peningkatan dan Perlindungan Konsumen dengan rerata tingkat pencapaian sasaran sebesar 161,67 % yang terbagi menjadi 2 Indikator Kinerja.
5. Pencapaian sasaran strategis kelima yaitu Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor dengan satu Indikator Kinerja Utama yaitu Pertumbuhan Nilai Ekspor Kalbar dengan target sebesar 12% dan realisasi sebesar 3,83 % dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 31,92 %.
6. Pencapaian sasaran strategis keenam yaitu Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha dengan rerata tingkat pencapaian sasaran sebesar 90 % yang terbagi menjadi 3 Indikator Kinerja Utama.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan sasaran strategis pada tahun 2013 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Struktur industri Kalbar masih sangat rapuh dan didominasi oleh industri hulu sedang/besar dengan nilai tambah produk yang relatif kecil. Keterbatasan teknologi, permodalan, investasi baru di bidang industri, SDM industri yang tidak memadai dan lokasi industri masih terpecah-pecah (tidak terstruktur) dan belum tersedia Kawasan Industri, industri yang tumbuh di Kalbar baik antara hulu - hilir (maupun antara IKM dan usaha besar) belum terhubung dalam *linkage* yang saling menguntungkan. Revitalisasi Industri sebagai jawaban atas De-industrialisasi (peranan sektor industri yang terus menurun) di Kalbar, masih terkendala permasalahan klasik persoalan infrastruktur terutama ketersediaan pelabuhan yang layak, energi khususnya listrik, serta infrastruktur penunjang lainnya. Pembangunan Kawasan Industri, lengkap dengan segala fasilitas yang layak serta jaminan keamanan dan kelancaran usaha merupakan resep yang mutakhir untuk menarik industri-industri besar masuk ke wilayah Kalbar.
2. Kinerja IKM yang merupakan salah satu sumber penyerap tenaga kerja terbesar, jika dibandingkan dengan kinerja Industri Besar dan sedang (IBS) masih sangat kecil. Permasalahan-permasalahan yang membelit IKM masih begitu banyak diantaranya permasalahan teknologi, permodalan, manajemen pemasaran, kesulitan dalam akses kredit perbankan, serta masalah lingkungan. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi secara komprehensif yang meliputi aspek manajerial seperti peningkatan kemampuan pemasaran serta pengembangan SDM, Aspek Permodalan misalnya dengan mencarikan bantuan modal seperti melalui BUMN, KUPEDES, KUK, KIK. Selain itu pengembangan program kemitraan misalnya dengan konsep bapak angkat, keterkaitan hulu-hilir (*forward-linkage*) atau hilir-hulu (*backward-linkage*), serta modal ventura atau dapat pula melalui Pengembangan sentra-sentra industri, serta pembinaan kelompok usaha bersama atau koperasi dapat juga menjadi salah satu solusi.
3. Wilayah Kalimantan Barat yang sangat luas dengan kondisi infrastruktur terutama sistem transportasi baik darat maupun laut yang masih memprihatinkan sangat rentan terhadap gejolak inflasi. Kondisi tersebut semakin memburuk pada saat menghadapi hari-hari besar keagamaan di mana permintaan barang dan jasa mengalami puncaknya. Di tahun 2013 Inflasi mengalami klimaksnya di awal triwulan III yang dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. *Distribution cost* barang-barang kebutuhan masyarakat meningkat drastis yang tentunya secara otomatis ikut melambungkan harga-harga barang. Mendorong peningkatan kualitas infrastruktur tentunya mutlak diperlukan, namun demikian dari kaca mata Dinas Perindag sebagai instansi yang bertanggung jawab dari sisi perdagangan, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat serta mendorong koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk bekerja maksimal dalam mengkaji dan mengantisipasi laju inflasi. Selain itu, monitoring harga-harga bahan pokok harus terus diintensifkan sebagai sebuah peta panduan untuk melakukan tindakan-tindakan taktis dalam mengendalikan gejolak harga, seperti misalnya untuk melakukan tindakan operasi pasar.

4. kinerja perlindungan konsumen sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sebenarnya masih dapat lebih ditingkatkan jika tersedianya di seluruh Kabupaten/kota se-kalbar SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan terbentuk lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang kewenangannya ada pada Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2012 baru terdapat tiga kota yang telah ditelahi dikeluarkan keputusan dibentuknya BPSK yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang. Di bidang Kemetrolgian, saat ini di Kalbar baru ada dua UPT kemetrolgian yang beroperasi yang merupakan instansi milik Pemprov Kalbar yang harus melayani 14 kab/kota. Pada struktur organisasi Kementerian Perdagangan yang terbaru, penanganan perlindungan konsumen yang didukung oleh infrastruktur kemetrolgian dan unit-unit kerja pengujian mutu barang ditangani langsung oleh direktorat jenderal tersendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perindag Prov. Kalbar terus giat melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota serta mendorong dan memfasilitasi pembentukan BPSK serta UPTD kemetrolgian di wilayah mereka.
5. Pertumbuhan ekspor Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dan hal ini cukup menggembirakan walaupun masih jauh dari target yang diharapkan. Pertumbuhan ekspor 3,83 % merupakan nilai maksimal yang berhasil Kalbar capai mengingat masih lesunya perdagangan komoditi karet dunia yang merupakan salah satu sumber ekspor utama Kalbar. Perlu diketahui sejak bulan Oktober 2012 hingga 31 maret 2013, Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat untuk melaksanakan kebijakan memangkas volume ekspor karet untuk mengurangi suplai karet ke pasar dunia dengan harapan dapat meningkatkan harga karet. Mengatasi kondisi tersebut, saat ini sedang gencar diupayakan untuk mencari substitusi perananan komoditi karet dalam struktur ekspor Kalbar. Salah satu upaya jangka pendek adalah dengan mengupayakan potensi CPO Kalbar yang berjumlah sekitar 1 juta ton per tahun dapat diekspor melalui Kalimantan Barat. Diharapkan ekspor CPO langsung tersebut dapat mengamankan neraca perdagangan dan menjadi tambahan pendapatan daerah melalui bagian dari bea keluar CPO.
6. Peningkatan kualitas pelayanan UPT di lingkungan Dinas Perindag perlu terus ditingkatkan. Namun demikian kendala klasik sepertinya mahalnya biaya operasional laboratorium serta peningkatan kapasitas SDM laboratorium. Arah kebijakan yang belum pasti juga menjadi kendala dalam pengembangannya ke depan. UPSMB sebagai laboratorium pengujian yang tadinya dimungkinkan untuk menarik retribusi, berdasarkan peraturan yang ada, tidak lagi dapat meretribusikan jasanya. Untuk itu diperlukan sebuah kajian tentang orientasi UPSMB ke depannya. Sementara itu UPT Kemetrolgian dengan payung hukum kemetrolgian nasional memiliki prospek yang jelas. Permasalahan yang ada saat ini di Kalbar adalah kurangnya UPT kemetrolgian serta tenaga kemetrolgian dalam melayani seluruh kabupaten/kota yang ada. Namun demikian kendala tersebut sudah mulai ditindak lanjuti. Kementerian Perdagangan bersama dengan Dinas Perindag Kalbar saat ini

sedang giat menggalakkan berdirinya UPTD kemetrolgian di wilayah Kabupaten/kota di Kalbar.

B. SARAN

Berdasarkan catatan-catatan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di atas, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan Industri dan perdagangan Kalimantan Barat di tahun 2013 dan dalam mengantisipasi tantangan pengembangan indag ke depan yang diramalkan akan semakin berat, peningkatan kapasitas kinerja Dinas Perindag Kalbar harus terus menerus dilakukan. Peningkatan Kinerja tersebut setidaknya harus dilakukan secara internal dan eksternal yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

INTERNAL

BUDAYA KERJA

- Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku agen pembangunan bidang industri dan perdagangan Kalbar dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat di depan.
- Diperlukan komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Dinas Perindag Kalbar terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam arah kebijakan Dinas yang tertuang dalam Renstra.
- Peningkatan harmonisasi dan kekompakan kerja sebagai sebuah satu kesatuan dalam 'keluarga' Dinas Perindag Kalbar untuk suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan industri dan perdagangan di Kalimantan Barat.

PERENCANAAN

- Peningkatan terobosan-terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa peningkatan penggunaan pola bottom-up dalam mekanisme penyusunan program kerja/anggaran sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
- Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang industri dan perdagangan.

MONEVLAP

- Peningkatan optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kalbar yang secara pro aktif

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Peningkatan kualitas pelaporan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga mampu merepresentasikan hubungan capaian kerja dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan serta mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

EKSTERNAL

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

- Peningkatan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik instansi pusat maupun daerah (Provinsi dan kabupaten/kota), akademisi, assosiasi, pengusaha, serta masyarakat (civil society) dalam penyelenggaraan pembangunan indag Kalimantan Barat, mengingat berbagai pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap entitas tersebut.

PUBLIKASI

- Peningkatan peranan publikasi terkait pelaksanaan pembangunan serta isu-isu strategis indag Kalbar di tengah era teknologi informasi dengan memanfaatkan laman website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar dan memanfaatkan media internal di lingkungan Kantor Dinas Perindag serta dengan menggunakan media lainnya seperti surat kabar dan televise. Peranan publikasi menjadi sangat penting sebagai layanan informasi kepada masyarakat serta dapat membangun opini untuk mengangkat isu-isu strategis khususnya terkait industri dan perdagangan Kalimantan Barat.

Sebagai penutup laporan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar 2013 ini, segenap jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar berharap bahwa laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan Kalbar di tahun-tahun ke depan, sehingga mimpi kita untuk mewujudkan visi **“Kalimantan Barat menjadi daerah industri maju dan perdagangan yang tangguh”** dapat terwujud.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 REKAPITULASI LAPORAN BARANG PER 31 DESEMBER 2013

NO	NERACA		BUKU INVENTARIS		KETERANGAN	
	KLASIFIKASI	NILAI	KLASIFIKASI	NILAI	Sebab terjadinya selisih	Selisih nilai
1	Tanah	2.749.864.708	KIB A	2.749.864.708		
2	Peralatan dan Mesin	5.647.971.292	KIB B	5.688.321.688	Barang rusak berat	(40.350.396)
3	Gedung dan Bangunan	2.797.345.078	KIB C	2.797.345.078		
4	Jalan, irigasi, dan jaringan lainnya	117.050.000	KIB D	117.050.000		
5	Aset tetap lainnya	18.600.000	KIB E	18.600.000		
6	Aset tak Berwujud	-		-		
7	Aset lain-lain	40.350.396		-		
8	Persediaan	14.497.700		14.497.700		
	TOTAL	11.385.679.174		11.385.679.174		

Sumber: Dinas Perindag Kalbar 2013

**LAMPIRAN 2 KOMPOSISI APARATUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV.
KALBAR**

No	Bidang / UPT	Jlh Pega - wai	Eselon			Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
			II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86	1	5	15	1	19	57	9	10	30	6	37	1	2
2	UPSMB	22		1	3	2	1	18	1	1	10	1	8	2	0
3	UP Kemetrolgian Pontianak	26		1	3	0	8	16	2	1	9	5	11	0	0
4	UP Kemetrolgian Singkawang	9		1	2	1	2	6	0	0	2	0	6	1	0
5	UP IKM	16		1	2	0	1	14	1	0	5	3	8	0	0
Total		159	1	9	25	4	31	111	13	12	56	15	70	4	2

LAMPIRAN 3 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4		
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1. Laju Pertumbuhan sektor Industri Kalbar per tahun	2.76%	4,59%	166,30
		1.2. Jumlah Kawasan Industri yang difasilitasi penumbuhannya	2 Kawasan	3 kawasan	150
		1.3. Penumbuhan dan Penguatan Industri Unggulan Provinsi	2 Unit Usaha	9 Unit usaha	450
		1.4. Jumlah Alsintan yang diperbaiki / dibuat	10 Unit	22 unit	220
2	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	2.1. Persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	4.70%	1.40%	29.79
		2.2. Jumlah IKM Kalbar yang mendapat penghargaan baik skala nasional maupun internasional	3 Unit Usaha	2 Unit Usaha	66.67
		2.3. Jumlah Pembentukan dan Penguatan sentra / unit usaha IKM	86 Unit Usaha	213 unit usaha	247,67
		2.4. Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi	30 Unit Usaha	60 unit usaha	200
3	PENINGKATAN EFISIENSI DISTRIBUSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.1. Laju Inflasi Kalimantan Barat	5.47%	9.48%	57.70
4	PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4.1. Jumlah UTTP (alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang wajib Ditera di Pasar Tradisional yang	370 UTTP di 5 pasar tradisional	597 UTTP di 5 ps tradisional	161. 35

	Diawasi				
	4.2. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi	6 jenis barang	7 jenis (barang bersertifikat SNI)	116.67	
5	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Kalimantan Barat	12%	3,83%	31.92
RERATA PERSENTASE PENCAPAIAN TERHADAP TARGET				139.92	

